

FLASH REPORT

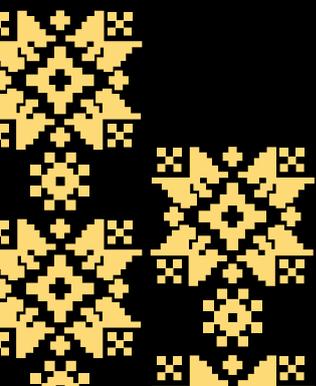
GOVERNMENT

FINANCE

STATISTIC

Triwulan III 2024

Kanwil DJPb Sumsel





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 2, Palembang 30129; TELEPON (0711) 356534, 353526; FAKSIMILI (0711) 310891; SUREL :
kanwildjpbnsmsel@kemenkeu.go.id; LAMAN : www.djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel

NOTA DINAS
NOMOR ND-1046/WPB.07/2024

Yth. : Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) Triwulan III 2024 Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan
Tanggal : 28 Oktober 2024

Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-34/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-885/PB.6/2024 tanggal 15 Oktober 2024 hal Penyampaian LKPK-TW dan LSKP-TW Periode Triwulan III Tahun 2024, bersama ini disampaikan LKPK-TW dan LSKP-TW Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Selatan Periode Triwulan III Tahun 2024.

Dengan dukungan Ibu beserta jajaran, kami berkomitmen memberikan pelayanan sepenuh hati melalui birokrasi yang bersih dan tanpa biaya (Rp0).

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan



Ditandatangani secara elektronik
Sugeng Hermanto

\



GOVERNMENT FINANCE STATISTICS

Tahun 2024 Triwulan III

LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH

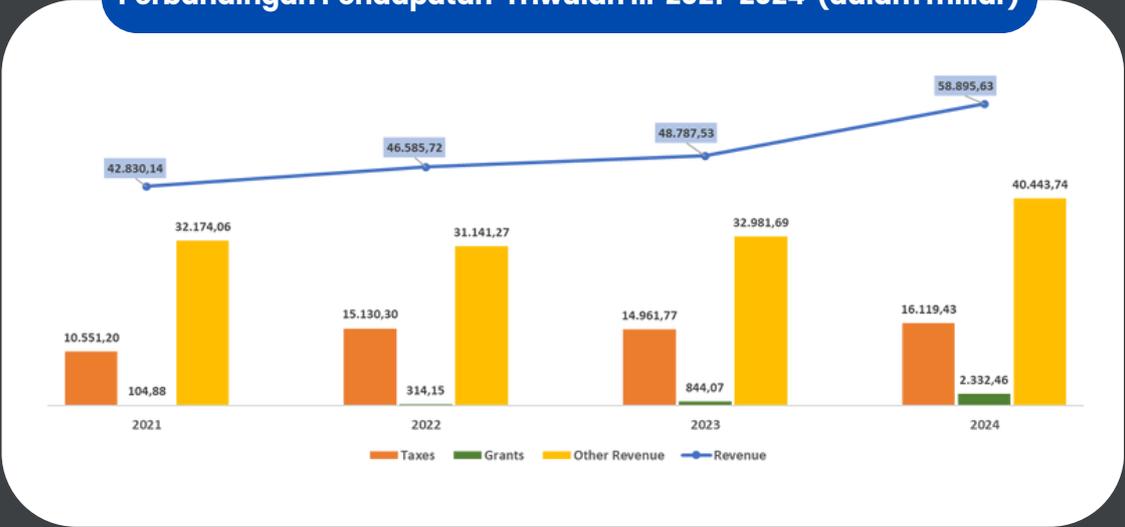
Laporan Operasional Statistik



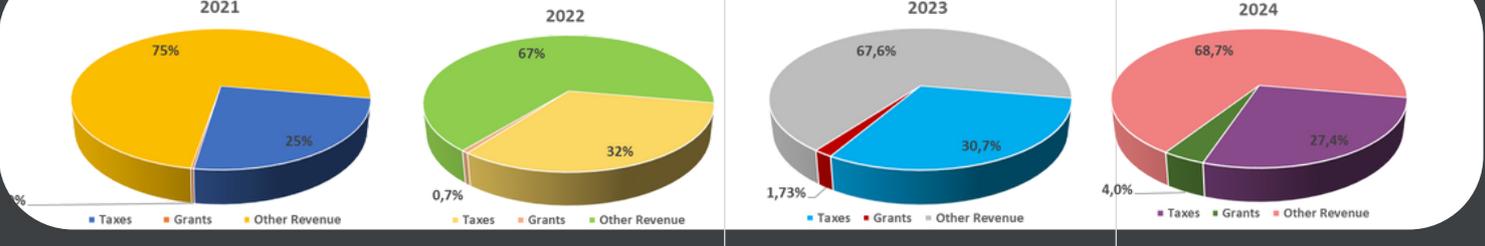
Laporan Operasional (LO) GFS merupakan ikhtisar transaksi Pemerintah Daerah pada periode pelaporan tertentu. LO GFS menyajikan detail transaksi pendapatan dan beban, investasi neto pada aset non keuangan, akuisisi neto aset keuangan dan jumlah neto kewajiban yang timbul

Tren Pendapatan LO Statistik

Perbandingan Pendapatan Triwulan III 2021-2024 (dalam miliar)



Persentase Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Triwulan III 2021-2024



LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH



Beban LO Statistik

Total Expense
Rp31,27 Triliun



01 Pempus
Rp33,3 Triliun

02 Pemda
Rp23,7 Triliun

03 Eliminasi
Rp25,8 Triliun

Compensation of employees
15,11 T ↑ 15,7%

Use of goods and service
10,19 T ↑ 18,5%

Interest
22,85 M ↓ 44,5%

Subsidies
11,49 M ↑ 23,3%

Grants
4,19 T ↓ 8,5%

Social Benefit
55,19 M ↑ 95,1%

Other Expense
1,71 T ↑ 70,2%

Neraca Statistik



Neraca Statistik menyajikan posisi aset, kewajiban, dan kekayaan netto pada akhir periode pelaporan



Financial Assets
Rp31,36 Triliun



Liabilities
Rp5,57 Triliun



Nonfinancial Assets
Rp305,33 Triliun

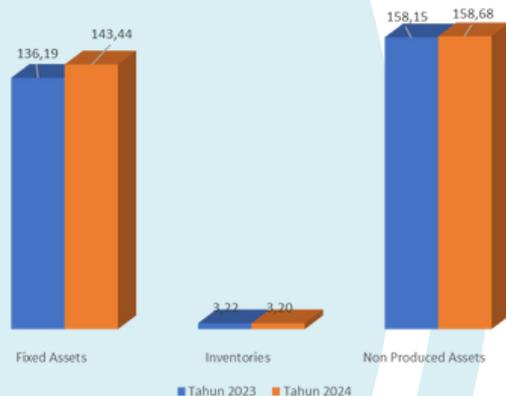


Net Worth
Rp331,12 Triliun

Perbandingan Komponen Neraca Statistik Tahun 2023 dan 2024 TW III (dalam triliun)



Perbandingan Komponen Aset non Keuangan Tahun 2023 dan 2024 TW III (dalam triliun)



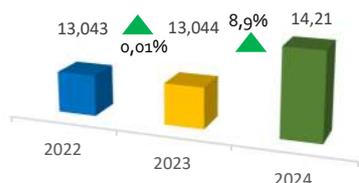
FLASH REPORT

A. Gambaran Umum Kondisi Keuangan LKPP-TW, LKPKD-TW, LKPK-TW dan LSKP-TW Provinsi Sumatera Selatan Triwulan III 2024

1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP -TW)

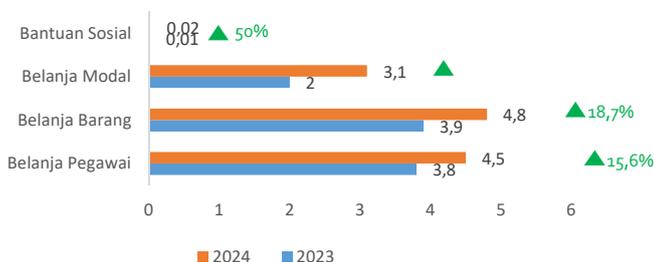
Realisasi pendapatan negara wilayah Sumsel triwulan III 2024 mencapai Rp14,21 triliun. Sampai dengan 30 September 2024, berdasarkan jenisnya, Penerimaan Pajak masih menjadi kontributor utama atas capaian pendapatan negara wilayah Sumsel, yaitu mencapai Rp11,84 triliun atau 83,31% dari total pendapatan negara. PNPB memberikan kontribusi sebesar Rp2,37 triliun atau 16,69%. Pendapatan sampai dengan triwulan III 2024 tumbuh positif sebesar 8,97% dibanding periode sama tahun 2023.

Realisasi Pendapatan Negara (Rp triliun)



Belanja Negara wilayah Sumsel sampai dengan 30 September 2024 terealisasi sebesar Rp36,41 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp12,47 triliun dan belanja transfer Rp23,93 triliun. Besaran realisasi belanja tumbuh 22,94% dibandingkan periode sama tahun 2023. Hal tersebut dikontribusi oleh Belanja Pemerintah Pusat 34,26% dan Transfer ke Daerah 65,74%.

Realisasi Per Jenis Belanja (Rp triliun)



APBN wilayah Sumatera Selatan menunjukkan angka defisit anggaran sebesar Rp22,19 triliun atau tumbuh negatif sebesar minus 5,62% (yoy).

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPKD -TW)

Kinerja APBD dari sisi pendapatan sampai dengan 30 September 2024 tumbuh positif sebesar 33,50% (yoy). Peningkatan pendapatan daerah dipengaruhi oleh meningkatnya PAD sebesar 12,33% (yoy), pendapatan transfer sebesar 39,69% (yoy) dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 6,72%. Pertumbuhan positif juga diikuti oleh kinerja APBD dari sisi belanja, yang tumbuh 21,46% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah (Rp miliar)

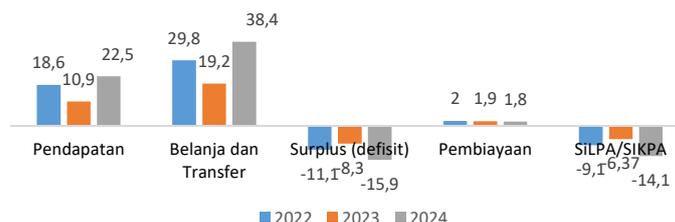
Uraian	2014	2023	%
Pendapatan Daerah	31.588,10	23.661,54	33,50%
PAD	5.944,67	5.292,29	12,33%
Pendapatan Transfer	25.588,56	18.317,84	39,69%
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	54,87	51,42	6,72%
Belanja Daerah	25.318,70	20.846,00	21,46%
Belanja Operasi	18.015,21	14.937,19	20,61%
Belanja Modal	4.061,09	3.608,81	12,53%
Belanja Tidak Terduga	9,37	3,00	212,58%
Belanja Transfer	3.233,02	2.297,00	40,75%
SURPLUS / DEFISIT	6.269,40	2.815,54	122,67%
Pembiayaan	1.849,65	2.664,91	-30,59%
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	8.119,05	5.480,45	48,15%

Masih terdapat surplus APBD sebesar Rp6,27 triliun atau tumbuh 122,67% (yoy). Surplus APBD masih lebih dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat, meskipun PAD juga meningkat namun belum mencerminkan kinerja PAD yang optimal. Pendapatan Transfer berkontribusi 81,01% terhadap pendapatan daerah, hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih tergantung pada transfer dari pemerintah pusat untuk memenuhi belanja operasionalnya.

3. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK -TW)

Kinerja Pendapatan Pemerintah Konsolidasian sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp22,49 triliun, tumbuh positif Rp3,3 triliun atau 17,25% (yoy). Di sisi lain, kinerja Belanja Pemerintah Konsolidasian juga tumbuh positif sebesar Rp5,47 triliun atau 16,63%. Pemerintah Pusat berkontribusi utama dari sisi pendapatan yaitu 63,19% sedangkan dari sisi belanja, Pemerintah Daerah yang berkontribusi dominan yaitu 83,79%.

Laporan Keuangan Konsolidasian 2022-2024 Triwulan II (Rp triliun)





Defisit konsolidasian tercatat sebesar Rp15,92 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan negatif yang berarti celah defisit di lingkup konsolidasian tingkat wilayah Provinsi Sumatera Selatan meningkat sebesar 15,77% (yoy). Untuk menutup angka defisit tersebut, Pembiayaan Konsolidasian sampai dengan 30 September 2024 mencatatkan angka sebesar Rp1,85 triliun yang dalam hal ini menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar 30,59% (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi turunnya penerimaan pembiayaan dari pemerintah daerah dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar 33,80% (yoy).

4. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP - TW)

Sampai dengan 30 September 2024 transaksi pendapatan pemerintah di wilayah Sumatera Selatan sebesar Rp58,89 triliun yang terdiri dari pendapatan pajak sebesar Rp16,11 triliun, pendapatan hibah sebesar Rp2,33 triliun dan pendapatan lainnya sebesar Rp40,44 triliun. Transaksi pendapatan tumbuh 20,72% dibanding tahun sebelumnya periode yang sama.

Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Bersih	2024	2023	%
Pendapatan	58,89	48,79	20,70%
Beban	31,27	27,26	14,71%
Saldo Operasi Neto	27,63	21,52	28,39%

Pada sisi beban, angka yang tercatat sebesar Rp31,27 triliun atau tumbuh 14,71% (yoy), sehingga posisi saldo operasi neto di wilayah Sumatera Selatan sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp27,63 triliun.

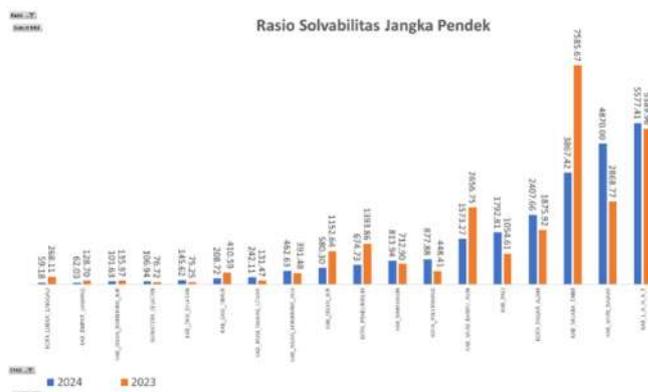
Transaksi pendapatan dan beban mempengaruhi posisi kekayaan bersih pemerintah di wilayah Sumatera Selatan, posisi kekayaan bersih sampai dengan 30 September 2024 sebesar Rp.331,12 triliun.

Balance Sheet	2024	2023	%
Aset Non keuangan	305,33	297,57	2,61%
Aset Keuangan	31,36	25,91	21,03%
Kewajiban	5,57	4,79	16,28%
Net Worth	331,12	318,67	3,91%

Kekayaan bersih sampai dengan 30 September 2024 meningkat sebesar 3,91% (yoy). Kekayaan bersih terdiri dari aset non keuangan sebesar Rp305,33 triliun, aset keuangan sebesar Rp31,36 triliun dan kewajiban sebesar Rp5,57 triliun.

B. Perkembangan Kondisi Keuangan Berdasarkan Analisis Laporan Keuangan

Rasio solvabilitas jangka pendek Pemerintah Konsolidasian Wilayah Provinsi Sumatera Selatan sampai triwulan III tahun 2024 adalah sebesar 314,05% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya dalam kondisi baik dimana setiap Rp100 kewajiban jangka pendek dijamin dengan Rp314,05 aset lancar. Rasio solvabilitas jangka pendek periode sampai dengan triwulan III 2024 menurun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023 yang sebesar 341,19%. Penurunan terjadi pada Pemerintah Daerah yang disebabkan adanya peningkatan kewajiban jangka pendek di tahun 2024.



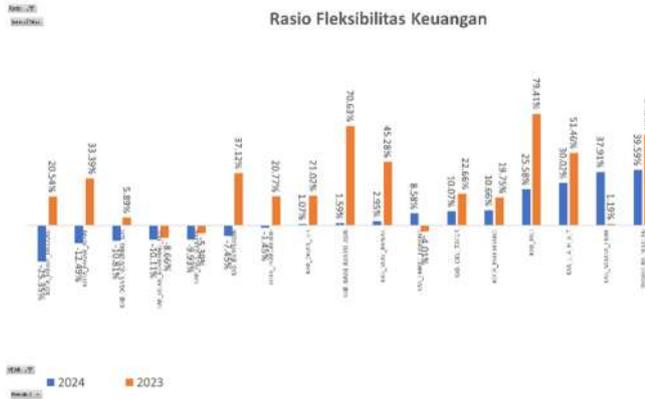
Meskipun secara total nilai solvabilitas jangka pendek memiliki nilai lebih dari 100%, akan tetapi masih terdapat Pemerintah Daerah dengan nilai rasio solvabilitas di bawah 100% yaitu pada Kota Lubuklinggau dan Kab. Empat Lawang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada kedua pemerintah tersebut memiliki kewajiban jangka pendek yang lebih besar dibandingkan dengan ketersediaan aset lancar.

Rasio solvabilitas jangka panjang pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Wilayah Provinsi Sumatera Selatan pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebesar 40,537.40% yang berarti kemampuan pemerintah konsolidasian dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya dalam kondisi baik dimana setiap Rp100 Kewajiban Jangka Panjang dijamin dengan Rp40,537.40. Kewajiban Jangka Panjang triwulan III tahun 2024 lingkup wilayah Sumatera Selatan terdapat pada Kab Banyuwasin, Kota Lubuklinggau, Kab.Ogan Ilir, Kab.OKU Selatan, Kab. Muaraenim dan Kota Palembang. Rasio solvabilitas jangka panjang pada periode triwulan III 2024 meningkat dibanding





pendapatan yang diperoleh dari pemda mampu dikelola secara aktif dalam bentuk belanja daerah.



Dari 18 Pemda terdapat 7 pemda yang menunjukkan angka minus. Rasio fleksibilitas keuangan terendah terdapat pada Pemerintah Kota Lubuklinggau sebesar -25,35%. Nilai rasio fleksibilitas keuangan tertinggi terdapat pada pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 46,50%. Namun, melihat rumusan perhitungan rasio fleksibilitas keuangan yang mengukur pendapatan yang belum teralokasikan mampu untuk membiayai belanja operasional dan pokok utang. Angka rasio yang minus menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan tidak tertutupi dari pendapatan yang belum dialokasikan tersebut, sedangkan sebaliknya angka rasio yang besar menunjukkan adanya dana yang belum digunakan untuk mendorong kinerja fiskal daerah. Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan rasio tersebut agar fleksibilitas keuangan yang dimiliki merupakan fleksibilitas daerah untuk mendanai pembangunan daerah.

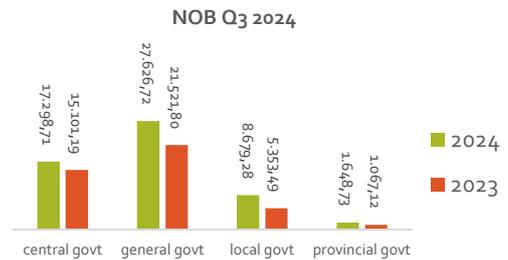
Adapun rasio keuangan daerah lainnya, tercantum dalam bagian lampiran analisis rasio keuangan LKPD laporan ini.

2. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

Analisis indikator fiskal menggambarkan kondisi keseimbangan fiskal pemerintah berdasarkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah. Adapun beberapa rasio keseimbangan fiskal yang akan ditampilkan dalam flash report ini antara lain Keseimbangan Operasi Neto (NOB) dan Keseimbangan Operasi Primer (POB). Sedangkan untuk indikator fiskal makro ekonomi ditampilkan pajak langsung (*Direct Taxes*), pajak tak langsung (*Indirect Taxes*), pajak modal (*Capital Taxes*) dan

Belanja Konsumsi Pemerintah (*Government Final Spending Expenditure*).

Analisa rasio keseimbangan fiskal sampai dengan triwulan III 2024 pada laporan operasional statistik Sumatera Selatan, untuk **Keseimbangan Operasi Neto (NOB)** menunjukkan nilai positif pada semua tingkatan pemerintahan dengan akumulasi sebesar Rp27,626,721,091,156.00. Nilai Keseimbangan Operasi Neto (NOB) periode Triwulan III tahun 2024 naik sebesar Rp6,104,920,581,090.00 atau 28,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp21,521,800,510,066.00.



Kenaikan keseimbangan operasi netto tersebut terjadi khususnya pada semua level pemerintahan, baik pusat, provinsi maupun kab/kota. Nilai terbesar terdapat pada tingkatan pemerintah pusat (*central government*), namun pertumbuhan terbesar terdapat pada pemerintah kabupaten/kota (*local government*). Hal ini disebabkan karena terdapat kenaikan pendapatan khususnya pada pendapatan transfer.

Selain itu, pada **Nilai Keseimbangan Operasi Primer (POB)** sampai dengan triwulan III 2024 juga menunjukkan nilai positif yaitu sebesar Rp27,649,573,625,934.00. Nilai POB di triwulan III 2024 menunjukkan pertumbuhan sebesar Rp6,086,564,877,529.00 atau 28,23% dari periode yang lalu. Nilai positif terjadi pada seluruh tingkatan pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah mampu membiayai seluruh beban operasi sehingga kesinambungan fiskal akan selalu terjaga.



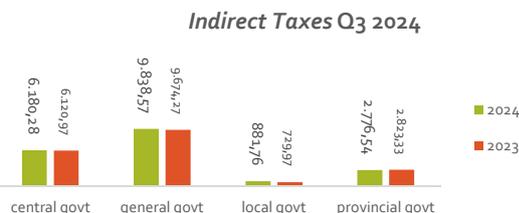


Analisis indikator fiskal makro ekonomi memberikan gambaran tambahan atas kondisi fiskal melalui beberapa indikator a.l pajak langsung, pajak tidak langsung, pajak modal dan belanja konsumsi pemerintah. Kinerja fiskal makro ekonomi Sumatera Selatan s.d Triwulan III untuk **Pajak Langsung (Direct Taxes)** pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 5,971,623,976,574.00, mengalami kenaikan pada Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp 889,912,338,371.00 atau 17,51% dibanding periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp 5,081,711,638,203. Kenaikan tersebut utamanya berasal dari kenaikan PPh 21 pribadi dan Pajak Bumi dan Bangunan.



Dilihat dari kontribusi penerimaan *direct taxes*, paling besar berasal dari tingkatan pemerintah pusat (*central government*) yang didorong oleh penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan perorangan dan badan usaha. Dari sisi pertumbuhan, pemerintah kabupaten/kota (*local government*) memberikan pertumbuhan sebesar 45% yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

Nilai Pajak Tidak Langsung (*Indirect Taxes*) pada Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan III 2024 sebesar Rp 6,180,279,260,611.00, mengalami penurunan yaitu sebesar minus Rp3,493,986,613,675.00 atau -36,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp9,674,265,874,286.00.

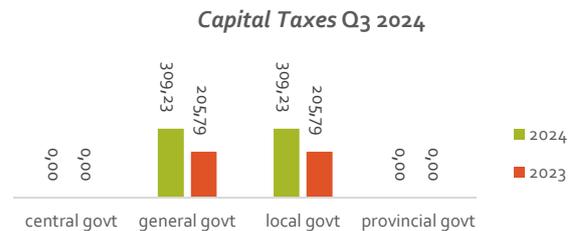


Jika dilihat dari pertumbuhan penerimaan Indirect Taxes di triwulan III 2024, hampir disemua tingkatan menunjukkan kontraksi (central government & provincial government), namun pada tingkatan *local government* menunjukkan pertumbuhan positif. Dari

sisi kontribusi, kontribusi terbesar berasal dari tingkatan *central government* dan *provincial government*.

Pajak Tidak Langsung pada Pemerintah Pusat didominasi oleh PPN Dalam Negeri, Pajak Tidak Langsung pada Pemerintah Provinsi didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak pada Pemkab/Pemkot didominasi oleh Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran. PPN Dalam Negeri mengalami kontraksi dikarenakan adanya peningkatan restitusi pada sektor industri pengolahan sedangkan kontraksi pada Pajak Kendaraan Bermotor diindikasikan karena penerapan UU HKPD sehingga berdampak pada penurunan tarif Pajak Kendaraan bermotor dan pengaruh penerapan aplikasi SIPD. Namun, pertumbuhan positif pada tingkatan kab./kota mengindikasikan adanya geliat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan.

Nilai **Pajak Modal (Capital Taxes)** s.d Triwulan III 2024 pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp309.234.553.748 yang mengalami kenaikan sebesar Rp Rp103,440,195,789 atau 50,26% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp 205,794,357,959.00. Pajak Modal (*Capital Taxes*) hanya terdapat pada Pemkab/Pemkot yaitu berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kenaikan Pajak Modal (*Capital taxes*) tersebut mengindikasikan adanya peningkatan investasi/pembangunan di wilayah Sumatera Selatan.



Belanja Konsumsi Final Pemerintah s.d Triwulan III 2024 pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp23,984,579,885,897.00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp3,858,471,056,537.00 atau 19,13% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp 20,126,108,829,360.00.





Government Final Consumption Expenditure Q3 2024

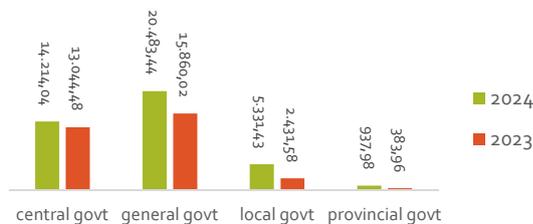


Jika dilihat secara perbandingan per tingkatan, Belanja Konsumsi Final Pemerintah pada tingkatan *Local Government* memberikan dorongan terbesar. Apabila dilihat secara seksama, dorongan belanja konsumsi pemerintah terbesar berasal dari belanja-belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab./Kota) dibanding belanja yang dilakukan oleh satuan-satuan kerja pemerintah pusat di Sumatera Selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja belanja daerah memberikan dorongan terbesar untuk pertumbuhan ekonomi khususnya pada belanja final konsumsi pemerintah.

3. Analisis Indikator Pembiayaan

Jika dilihat dari indikator pembiayaan, seluruh pembiayaan di Sumatera Selatan berasal dari pembiayaan dalam negeri, dan pada seluruh tingkat pemerintahan, pemerintah pusat berkontribusi paling besar. Analisis Indikator Pembiayaan yaitu *Domestic Financing* di Sumatera Selatan di triwulan III 2024 senilai Rp20,483,439,216,659.00 merupakan Transaksi Aset Keuangan dengan unit institusi residen dikurangi kewajiban dengan unit institusi residen yang seluruhnya bersumber dari debitur/kreditur dalam negeri.

Domestic Financing Q3 2024

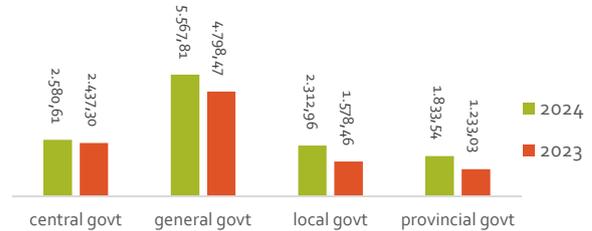


4. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

Analisis berdasarkan indikator kekayaan dan utang pemerintah Sumatera Selatan pada Utang Bruto Gross Debt di triwulan III 2024 sebesar Rp

5,567,812,216,529.00. Utang tersebut terdapat pada seluruh tingkatan pemerintahan dan sebagian besar berupa kewajiban jangka pendek (Utang Transfer dan Belanja yang Masih Harus di Bayar).

Gross Debt Q3 2024



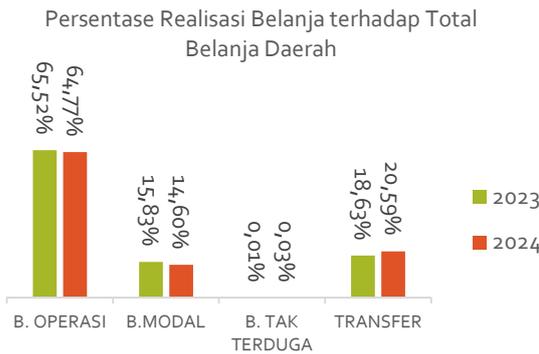
Utang Bruto di Sumatera Selatan terdapat pada seluruh tingkatan pemerintahan, dan sebagian besar berupa kewajiban jangka pendek.

C. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Yang Berdampak Pada Kinerja Keuangan Dan Statistik

1. Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemda Sumsel masih memerlukan perhatian;

Berdasarkan analisa rasio keuangan Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan s.d Triwulan III 2024, beberapa rasio menunjukkan kinerja keuangan di Sumsel masih memerlukan perhatian. Pada rasio kemandirian fiskal, terlihat bahwa hanya terdapat 2 Pemda yang menunjukkan angka kategori sedang yaitu Pemerintah Provinsi Sumsel dan Pemerintah Kota Palembang. Hal tersebut konsisten dengan rasio Kemandirian Fiskal Triwulan III 2023 yang menunjukkan pemda yang sama masuk dalam kategori sedang. Terdapat 16 Pemda yang masuk dalam kategori rendah, hal tersebut menjadi tantangan bagi Pemda lainnya yang bergantung dengan sektor primer seperti pertambangan dan perkebunan untuk mendorong perubahan sektor ekonomi dengan belanja daerah. Untuk mendorong/mengubah sektor perekonomian tersebut, pemda perlu melakukan belanja daerah yang mempunyai *leverage* tinggi dan tidak hanya didominasi oleh belanja operasional. Sampai saat ini secara konsolidasi, belanja daerah di Sumsel masih didominasi oleh belanja operasi (diatas 60%).





Selain itu, pada rasio **Fleksibilitas Keuangan** secara agregat triwulan III 2024 sebesar 12,64% yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 35,18%. Penurunan angka pada rasio tersebut mengindikasikan berkurangnya *spare* pendapatan daerah yang tidak dipergunakan untuk operasional dan kewajiban daerah. Hal tersebut menunjukkan keefektifan pengelolaan keuangan daerah yang semakin membaik untuk operasional dan ekspansional (pembangunan, dll).

Namun jika kita detail per pemda, terdapat 7 Pemda yang mempunyai rasio fleksibilitas kemandirian yang minus dan 5 pemda yang mempunyai nilai rasio diatas agregat.

Pemda	2024
KOTA_LUBUK_LINGGAU	-25.35%
KOTA_PAGAR_ALAM	-12.49%
KAB_OGAN_KOMERING_ILIR	-10.81%
KAB_OGAN_KOMERING_ULU	-10.11%
KAB_OKU_SELATAN	-9.93%
KAB_BANYUASIN	-7.45%
KOTA_PRABUMULIH	-1.45%
KAB_OGAN_ILIR	1.07%
KAB_MUSI_BANYU_ASIN	1.59%
KAB_MUSI_RAWAS	2.95%
KAB_EMPAT_LAWANG	8.58%
KAB_OKU_TIMUR	10.07%
KOTA_PALEMBANG	10.66%
KAB_PALI	25.58%
KAB_L_A_H_A_T	30.02%
KAB_MUARA_ENIM	37.91%
SUMATERA_SELATAN	39.59%
KAB_MUSI_RAWAS_UTARA	46.50%

Hal tersebut menunjukkan ketidakmerataan pengelolaan keuangan daerah untuk menyiapkan fleksibilitas pendanaan belanja daerah yang bersifat pembangunan.

2. Penerapan aplikasi SIPD, masih menjadi persoalan pada Pemda di Sumsel;

Berdasarkan laporan dari Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan selain isu kemampuan SDM yang tidak merata, terdapat kendala terkait penerapan aplikasi SIPD di daerah. Permasalahan masih berjalan sejak awal

penerapan dan terjadi s.d akhir triwulan III 2024. Beberapa permasalahan yang muncul dari pelaporan pemda sampai dengan saat ini :

- Belum tersedianya banyak fitur di aplikasi SIPD khususnya untuk pengesahan transaksi yang berasal dari BLUD;
- Aplikasi sering error saat digunakan (*force logout*), hal tersebut menyebabkan pemda memakan waktu lama dalam menyelesaikan pekerjaan;
- Sering muncul *double* jurnal pada buku besar;
- Pada fitur input saldo awal, masih terdapat beberapa akun yang belum tersedia sehingga berdampak kepada angka neraca;
- Angka yang dikeluarkan dari SIPD masih membutuhkan penyesuaian sehingga Pemda membuat pengawasan secara terpisah dari aplikasi (bahkan dibuat secara manual).
- Layanan *helpdesk* dari Pusdatin Kemendagri sangat lama sehingga Pemda harus berkoordinasi langsung ke Kemendagri jika ada kendala.

D. Resume Pelaksanaan Kegiatan

Pada periode triwulan III 2024, dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan baik pemerintah pusat dan daerah telah dilakukan kegiatan oleh Bidang PAPK sebagai berikut:

- Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Prov. Sumatera Selatan pada tanggal 12 Agustus 2024.



Kegiatan ini dilaksanakan secara *onsite* bertempat di BPKP Perwakilan Sumsel yang diikuti oleh pejabat dan pegawai Bidang PAPK dan BPKP Perwakilan Sumsel. Kegiatan bertujuan untuk memperoleh informasi terkait akuntansi desa dan peluang kerjasama





pembinaan akuntansi desa dengan BPKP Perwakilan Sumsel.

- Selanjutnya, dalam rangka publikasi laporan GFS Semester I 2024, telah dilakukan melalui fasilitas *Knowledge Management System (KMS)* Kanwil DJPb Sumsel yang dapat diakses secara publik melalui *link*: bit.ly/RAGITDOBEL03.



Untuk amplifikasi lebih lanjut, publikasi GFS juga dilakukan melalui *website* DJPb Sumsel



yang dapat diakses di alamat <https://djp.b.kemenkeu.go.id/kanwil/sumsel>

E. Kesimpulan dan Saran

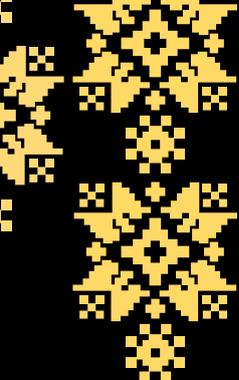
- Kinerja APBN dan APBD di Sumsel s.d Triwulan III 2024 menunjukkan pertumbuhan positif. Terlihat dari analisa rasio kemampuan fiskal NOB dan POB yang bernilai positif dan tumbuh dari tahun yang lalu mengindikasikan secara fiskal mampu mendanai Belanja dan kewajiban baik tingkat pusat dan daerah.
- Selain itu terlihat dari Indikator Fiskal Makroekonomi menunjukkan indikasi yang baik. Pertumbuhan terjadi pada Pajak Langsung dan Pajak Modal. Pajak Langsung disokong oleh Pajak Penghasilan dan Pajak Bumi Bangunan sedangkan Pajak Modal disokong oleh BPHTB. Pertumbuhan pada kedua indikator tersebut menunjukkan adanya indikasi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan/investasi di Sumatera Selatan.

- Pada sisi Belanja Final Pemerintah di Triwulan III 2024 menunjukkan pertumbuhan. Dorongan terbesar belanja pemerintah berasal dari konsolidasi belanja pemerintah daerah (provinsi & Kab./kota). Hal tersebut menunjukkan bahwa belanja daerah lebih memberikan kontribusi besar dibandingkan belanja pusat di Sumatera Selatan.
- Namun, kontribusi besar tersebut harus diiringi dengan pengelolaan keuangan yang baik. Berdasarkan rasio kemandirian fiskal di Sumsel, bahwa daerah masih sangat bergantung kepada sektor ekonomi primer. Sedangkan dari rasio fleksibilitas keuangan, terlihat pada setiap pemda terjadi kesenjangan fleksibilitas.
- Dari sisi tata kelola pelaksanaan APBD, aplikasi SIPD masih menjadi persoalan yang dihadapi Pemda. Menjelang akhir tahun anggaran pemda mengharapkan adanya perbaikan system sehingga tidak mengganggu proses bisnis yang ada di daerah.

Saran

- Pemda memperbaiki tata kelola keuangan daerah. Mempercepat penerapan UU HKPD yang lebih fokus belanja daerah untuk pembangunan. Pemda juga dapat melakukan pembiayaan dengan *creative financing* agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak lagi mengandalkan sektor primer kedepannya.
- Terkait dengan penggunaan aplikasi SIPD, pemda perlu berkoordinasi dengan Kemendagri dan membuat sistem cadangan (*backup/pengawasan*) untuk menjaga kevaliditas data laporan keuangan Pemerintah Daerah di akhir tahun anggaran. Selain itu, suatu keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya, terutama sumber daya manusia yang memiliki peran penting untuk menentukan suatu keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Pemda bersama Kemendagri perlu memberikan pelatihan yang lebih optimal kepada pegawai yang akan menggunakan SIPD RI agar mereka dapat memahami dan mengoptimalkan penggunaan sistem tersebut.





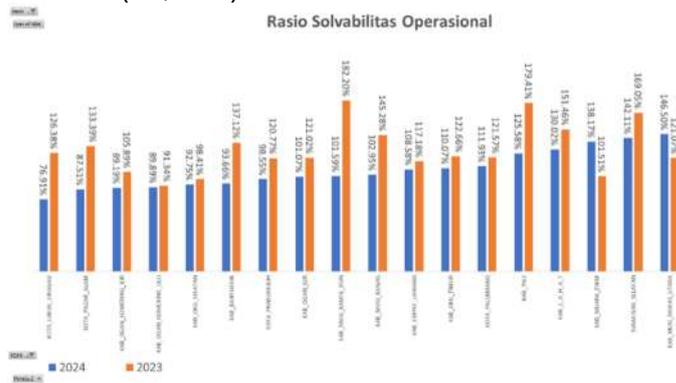
LAMPIRAN ANALISIS RASIO



3.	<p>Rasio Solvabilitas Layanan</p>	<p>Rasio Solvabilitas Layanan di Sumatera Selatan Triwulan III tahun 2024 menunjukkan angka Rp10.755.199,60 yang berarti bahwa untuk setiap kebutuhan pelayanan menurut fungsi dan jenis pelayanan yang akan diterima oleh per 1 orang penduduk di wilayah layanan Pemda di Sumatera Selatan dapat dipenuhi /dijamin dengan nilai aset yang digunakan untuk pelayanan publik senilai Rp10.755.199,60. Jika dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 7,07% (yoy).</p> <p>Jika dilihat dari rasio layanan di masing-masing Pemda, nilai tertinggi terdapat pada pemda Kabupaten PALI dan nilai terendah terdapat pada pemda provinsi Sumatera Selatan. Tingginya rasio layanan di Kab. PALI menunjukkan kondisi jumlah aset yang tercantum dalam neraca lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk di Kab. PALI. Jumlah penduduk di Kab.PALI masuk dalam 5 wilayah yang me</p>
4.	<p>Rasio Solvabilitas Operasional</p>	<p>Rasio Solvabilitas Operasional pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lingkup Provinsi Sumatera Selatan pada triwulan III 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar</p>

113,47% dan 138,03% yang menunjukkan bahwa pendapatan operasional secara rata-rata di seluruh pemda Sumatera Selatan periode triwulan III 2024 melebihi untuk menutupi beban operasionalnya. Namun jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, terdapat penurunan rasio solvabilitas operasional dikarenakan peningkatan beban operasional di tahun 2024 dipengaruhi kebijakan kenaikan ASN di tahun 2024 dan pelaksanaan pemilu dan pilkada.

Terdapat 11 dari 18 Pemda di Sumatera Selatan di triwulan III 2024 memiliki rasio solvabilitas operasional berada diatas angka 100%. Rasio Solvabilitas operasional tertinggi terdapat pada Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 146,50%. Namun masih terdapat 7 pemda di Sumatera Selatan pada triwulan III 2024 memiliki rasio solvabilitas operasional berada dibawah angka 100% yaitu Pemerintah Kota Lubuklinggau (76,91%), Pemerintah Kota Pagaralam (87,51%), Pemerintah Kab. OKI (89,19%), Pemerintah Kab. OKU (89,89%), Pemerintah Kab. OKU Selatan (92,75%), Pemerintah Kab. Banyuasin (93,66%) dan Pemerintah Kota Prabumulih (98,55%).



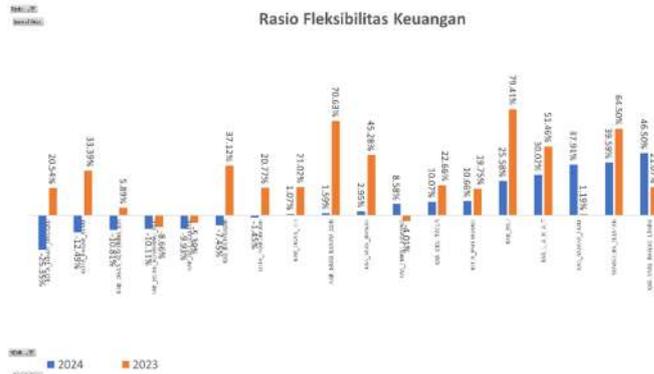
5. Rasio Fleksibilitas Keuangan

Rasio Fleksibilitas Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Sumatera Selatan pada periode triwulan III tahun 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 12,64% dan 35,18%. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemda di Sumatera Selatan secara umum mempunyai kapasitas positif untuk mendanai belanja operasional dan melakukan pembayaran pokok utang dengan menggunakan pendapatan daerah yang belum ada peruntukan.

Hal ini menunjukkan adanya indikasi dana yang belum ditentukan peruntukannya dan berpotensi menjadi SiLPA. Angka rasio fleksibilitas yang terlalu besar menunjukkan kinerja daerah yang tidak begitu perform namun rasio yang terlalu kecil menjadi indikator pengelolaan keuangan yang tidak baik.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama di 2023, nilai rasio fleksibilitas keuangan menunjukkan penurunan. Hal dapat menjadi indikasi bahwa dana pendapatan yang diperoleh dari pemda mampu dikelola secara aktif dalam bentuk belanja daerah. Sebagai catatan, bahwa nilai pendapatan adalah pendapatan sebelum dilakukan eliminasi dengan transaksi resipokal.

Dari 18 Pemda terdapat 7 pemda yang menunjukkan angka minus. Rasio fleksibilitas keuangan terendah terdapat pada Pemerintah Kota Lubuklinggau sebesar -25,35%. Nilai rasio fleksibilitas keuangan tertinggi terdapat pada pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 46,50%. Namun, melihat rumusan perhitungan rasio fleksibilitas keuangan yang mengukur pendapatan yang belum teralokasikan mampu untuk membiayai belanja operasional dan pokok utang. Angka rasio yang minus menunjukkan bahwa kebutuhan pendanaan tidak tertutupi dari pendapatan yang belum dialokasikan tersebut, sedangkan sebaliknya angka rasio yang besar menunjukkan adanya dana yang belum digunakan untuk mendorong kinerja fiskal daerah.

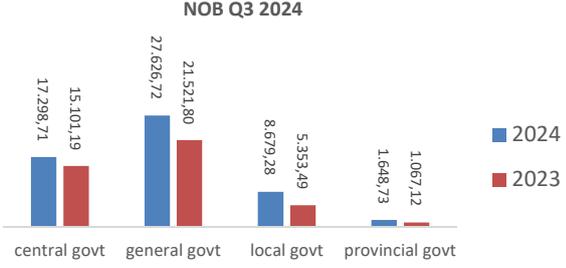
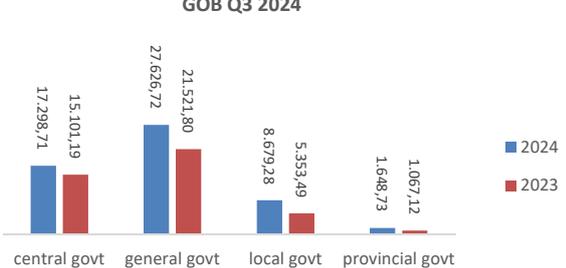


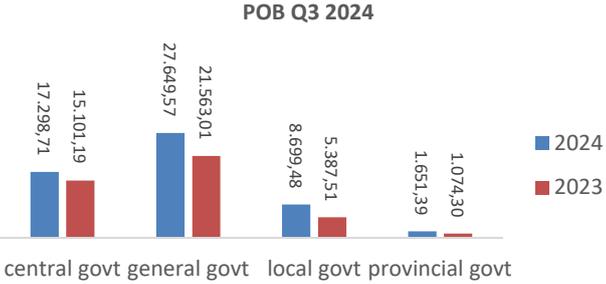
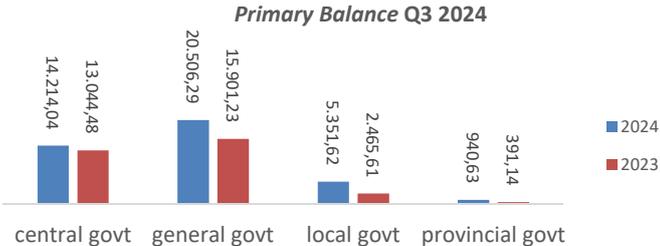
Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan rasio tersebut agar fleksibilitas keuangan yang dimiliki merupakan fleksibilitas daerah untuk mendanai pembangunan daerah.

B. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

1. Analisis Keseimbangan Fiskal

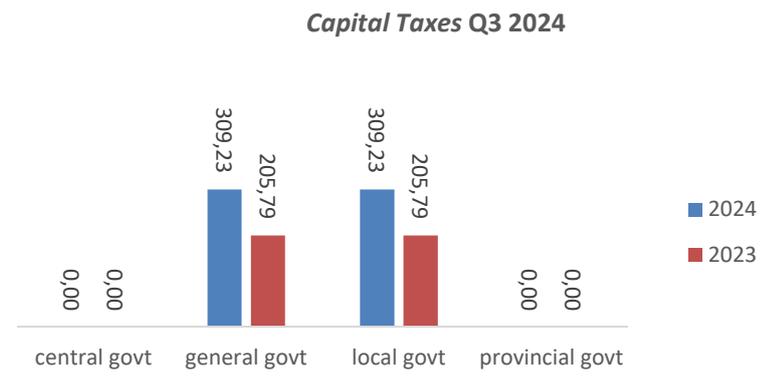
No	Jenis Analisis	Hasil Analisis
1.	Keseimbangan Operasi Neto (<i>Net Operating Balance</i>)	<p>Perubahan kekayaan selama transaksi berjalan menunjukkan nilai positif di seluruh tingkatan pemerintahan dengan akumulasi sebesar Rp27,626,721,091,156.00. Dengan demikian, nilai Keseimbangan Operasi Neto periode Triwulan III tahun 2024 naik sebesar Rp6,104,920,581,090.00 atau 28,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp21,521,800,510,066.00.</p> <p>Kenaikan keseimbangan operasi <i>netto</i> tersebut terjadi khususnya pada semua level pemerintahan, baik pusat, provinsi maupun kab/kota. Nilai terbesar terdapat pada tingkatan pemerintah pusat (<i>central government</i>), namun pertumbuhan terbesar terdapat pada pemerintah kabupaten/kota (<i>local government</i>). Hal ini disebabkan karena terdapat kenaikan pendapatan khususnya pada pendapatan transfer.</p>

		<p style="text-align: center;">NOB Q3 2024</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Government Level</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>17,298,71</td> <td>15,101,19</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>27,626,72</td> <td>21,521,80</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>8,579,28</td> <td>5,353,49</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>1,648,73</td> <td>1,067,12</td> </tr> </tbody> </table> <p>Sebagai catatan, bahwa nilai pendapatan adalah pendapatan yang telah dilakukan eliminasi dengan transaksi resiprokal.</p>	Government Level	2024	2023	central govt	17,298,71	15,101,19	general govt	27,626,72	21,521,80	local govt	8,579,28	5,353,49	provincial govt	1,648,73	1,067,12
Government Level	2024	2023															
central govt	17,298,71	15,101,19															
general govt	27,626,72	21,521,80															
local govt	8,579,28	5,353,49															
provincial govt	1,648,73	1,067,12															
2.	<p>Keseimbangan Operasi Bruto (Gross Operating Balance)</p>	<p>Nilai Keseimbangan Operasi Bruto periode triwulan III tahun 2024 sama dengan nilai Keseimbangan Operasi Neto. Seharusnya, nilai NOB mencakup semua beban, sedangkan nilai GOB tidak memperhitungkan Konsumsi Aset Tetap. Namun, saat ini komponen pembentuk Laporan Operasional Statistik adalah Laporan Realisasi Anggaran sehingga tidak mencatat konsumsi aset tetap.</p> <p>Nilai keseimbangan operasi bruto (GOB) menunjukkan pertumbuhan pada setiap level pemerintahan. Nilai terbesar terdapat pada tingkatan pemerintah pusat (<i>central government</i>), namun pertumbuhan terbesar terdapat pada pemerintah kabupaten/kota (<i>local government</i>).</p> <p style="text-align: center;">GOB Q3 2024</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Government Level</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>17,298,71</td> <td>15,101,19</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>27,626,72</td> <td>21,521,80</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>8,579,28</td> <td>5,353,49</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>1,648,73</td> <td>1,067,12</td> </tr> </tbody> </table>	Government Level	2024	2023	central govt	17,298,71	15,101,19	general govt	27,626,72	21,521,80	local govt	8,579,28	5,353,49	provincial govt	1,648,73	1,067,12
Government Level	2024	2023															
central govt	17,298,71	15,101,19															
general govt	27,626,72	21,521,80															
local govt	8,579,28	5,353,49															
provincial govt	1,648,73	1,067,12															
3.	<p>Peminjaman/Pinjaman Neto (Net Lending/Borrowing)</p>	<p>Nilai <i>Net Lending</i> Triwulan III Tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai positif yaitu sebesar Rp 20,483,439,216,659.00. Nilai <i>Net Lending</i> mengalami kenaikan sebesar Rp4,623,419,564,949.00 atau 29,15% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp15,860,019,651,710.00.</p> <p>Kenaikan nilai <i>Net Lending</i> dibandingkan tahun sebelumnya terjadi pada tingkatan pemerintahan pusat dan pemerintah kab/kota. Hal tersebut menunjukkan sumber daya finansial di setiap level pemerintah lebih besar diperoleh dari sektor perekonomian pada periode ini dibandingkan periode sebelumnya.</p>															

		 <p>Jika dilihat dari tingkatan pemerintah, nilai dari NLB terbesar terdapat pada tingkat pemerintah pusat (<i>central government</i>). Namun pertumbuhan tertinggi terdapat pada pemerintah daerah (<i>local government & provincial government</i>).</p>
4.	Keseimbangan Operasi Primer (<i>Primary Operating Balance</i>)	<p>Nilai Keseimbangan Operasi Primer triwulan III tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai positif yaitu sebesar Rp27,649,573,625,934.00. Nilai POB di triwulan III 2024 menunjukkan pertumbuhan sebesar Rp6,086,564,877,529.00 atau 28,23% dari periode yang lalu. Nilai positif terjadi pada seluruh tingkatan pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah mampu membiayai seluruh beban operasi sehingga kesinambungan fiskal akan selalu terjaga.</p> 
5.	Keseimbangan Primer (<i>Primary Balance</i>)	<p>Nilai Keseimbangan Primer triwulan III tahun 2024 pada LO Statistik menunjukkan nilai positif yaitu sebesar Rp20,506,291,751,437.00. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah mampu membiayai seluruh pengeluaran dan mampu memenuhi kewajiban pembayaran atas <i>interest expense</i> tanpa menimbulkan utang yang baru sehingga kesinambungan fiskal akan selalu terjaga. Selain itu, nilai keseimbangan primer di triwulan III tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan sebesar 28,96% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.</p> 

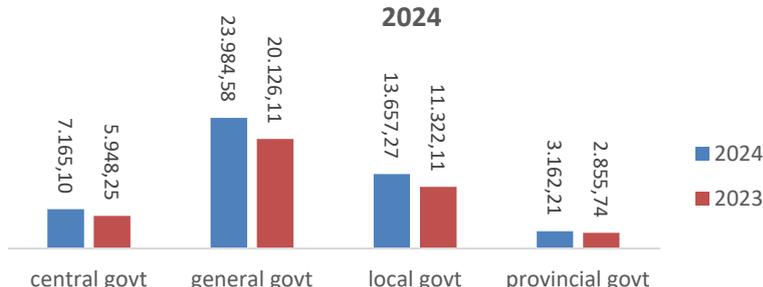
2. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi lainnya

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis															
1.	Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>)	<p>Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>) pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp 5,971,623,976,574.00 Pajak Langsung sebagian besar berupa Taxes on <i>income, profits, and capital gain</i> atau Pajak Penghasilan yang pemungutannya merupakan kewenangan pada Pemerintah Pusat. Pajak Penghasilan didominasi oleh PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29 Badan. Pajak Langsung Lainnya berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten. Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>) mengalami kenaikan pada Triwulan III tahun 2024 sebesar Rp 889,912,338,371.00 atau 17,51% dibanding periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp 5,081,711,638,203. Kenaikan tersebut utamanya berasal dari kenaikan PPh 21 pribadi dan Pajak Bumi dan Bangunan.</p> <p style="text-align: center;">Direct Taxes Q3 2024</p> <table border="1"> <caption>Data for Direct Taxes Q3 2024</caption> <thead> <tr> <th>Government Level</th> <th>2023 (Rp)</th> <th>2024 (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>4,901,780,000,000</td> <td>5,644,490,000,000</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>5,081,710,000,000</td> <td>5,971,620,000,000</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>179,930,000,000</td> <td>327,140,000,000</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>0,000,000,000</td> <td>0,000,000,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dilihat dari kontribusi penerimaan <i>direct taxes</i>, paling besar berasal dari tingkatan pemerintah pusat (<i>central government</i>) yang didorong oleh penerimaan yang berasal dari pajak penghasilan perorangan dan badan usaha. Dari sisi pertumbuhan, pemerintah kabupaten/kota (<i>local government</i>) memberikan pertumbuhan sebesar 45% yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.</p>	Government Level	2023 (Rp)	2024 (Rp)	central govt	4,901,780,000,000	5,644,490,000,000	general govt	5,081,710,000,000	5,971,620,000,000	local govt	179,930,000,000	327,140,000,000	provincial govt	0,000,000,000	0,000,000,000
Government Level	2023 (Rp)	2024 (Rp)															
central govt	4,901,780,000,000	5,644,490,000,000															
general govt	5,081,710,000,000	5,971,620,000,000															
local govt	179,930,000,000	327,140,000,000															
provincial govt	0,000,000,000	0,000,000,000															
2.	Pajak Tidak Langsung (<i>Indirect Taxes</i>)	<p>Pajak Tidak Langsung (<i>Indirect Taxes</i>) pada Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan s.d Triwulan III 2024 sebesar Rp 6,180,279,260,611.00. Pajak Tidak Langsung mengalami penurunan yaitu sebesar minus Rp3,493,986,613,675.00 atau -36,12% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp9,674,265,874,286.00.</p> <p style="text-align: center;">Indirect Taxes Q3 2024</p> <table border="1"> <caption>Data for Indirect Taxes Q3 2024</caption> <thead> <tr> <th>Government Level</th> <th>2023 (Rp)</th> <th>2024 (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>6,120,970,000,000</td> <td>6,180,280,000,000</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>9,674,270,000,000</td> <td>9,838,570,000,000</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>729,970,000,000</td> <td>881,760,000,000</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>2,823,330,000,000</td> <td>2,776,540,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	Government Level	2023 (Rp)	2024 (Rp)	central govt	6,120,970,000,000	6,180,280,000,000	general govt	9,674,270,000,000	9,838,570,000,000	local govt	729,970,000,000	881,760,000,000	provincial govt	2,823,330,000,000	2,776,540,000,000
Government Level	2023 (Rp)	2024 (Rp)															
central govt	6,120,970,000,000	6,180,280,000,000															
general govt	9,674,270,000,000	9,838,570,000,000															
local govt	729,970,000,000	881,760,000,000															
provincial govt	2,823,330,000,000	2,776,540,000,000															

		<p>Jika dilihat dari pertumbuhan penerimaan <i>Indirect Taxes</i> di triwulan III 2024, hampir disemua tingkatan menunjukkan kontraksi (<i>central government & provincial government</i>), namun pada tingkatan <i>local government</i> menunjukkan pertumbuhan positif. Dari sisi kontribusi, kontribusi terbesar berasal dari tingkatan <i>central government</i> dan <i>provincial government</i>.</p> <p>Pajak Tidak Langsung pada Pemerintah Pusat didominasi oleh PPN Dalam Negeri, Pajak Tidak Langsung pada Pemerintah Provinsi didominasi oleh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak pada Pemkab/Pemkot didominasi oleh Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran. PPN Dalam Negeri mengalami kontraksi dikarenakan adanya peningkatan restitusi pada sektor industri pengolahan sedangkan kontraksi pada Pajak Kendaraan Bermotor diindikasikan karena penerapan UU HKPD sehingga berdampak pada penurunan tarif Pajak Kendaraan bermotor dan pengaruh penerapan aplikasi SIPD. Namun, pertumbuhan positif pada tingkatan kab./kota mengindikasikan adanya geliat pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan.</p>															
3.	Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>)	<p>Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>) s.d Triwulan III 2024 pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp309.234.553.748 yang mengalami kenaikan sebesar Rp Rp103,440,195,789 atau 50,26% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp 205,794,357,959.00. Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>) hanya terdapat pada Pemkab/Pemkot yaitu berupa Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kenaikan Pajak Modal (<i>Capital taxes</i>) tersebut mengindikasikan adanya peningkatan investasi/pembangunan di wilayah Sumatera Selatan.</p> <p style="text-align: center;">Capital Taxes Q3 2024</p>  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Government Level</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>309,23</td> <td>205,79</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>309,23</td> <td>205,79</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Government Level	2024	2023	central govt	0,00	0,00	general govt	309,23	205,79	local govt	309,23	205,79	provincial govt	0,00	0,00
Government Level	2024	2023															
central govt	0,00	0,00															
general govt	309,23	205,79															
local govt	309,23	205,79															
provincial govt	0,00	0,00															
4.	Belanja Konsumsi Final Pemerintah (<i>Government Final Consumption Expenditure</i>)	<p>Belanja Konsumsi Final Pemerintah s.d Triwulan III 2024 pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp23,984,579,885,897.00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp3,858,471,056,537.00 atau 19,13% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp 20,126,108,829,360.00.</p> <p>Apabila melihat komponen pembentuk Belanja Konsumsi Final Pemerintah, telah terjadi kenaikan pada komponen <i>compensation of employee</i> dan <i>Use of goods and services</i></p>															

yang diiringi dengan penurunan pada komponen *Miscellaneous other expense* dan *Sales of goods and services*.

Government Final Consumption Expenditure Q3 2024

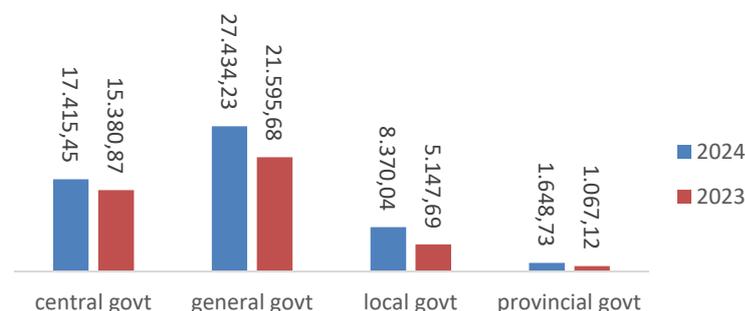


Jika dilihat secara perbandingan per tingkatan, Belanja Konsumsi Final Pemerintah pada tingkatan *Local Government* memberikan dorongan terbesar. Apabila dilihat secara seksama, dorongan belanja konsumsi pemerintah terbesar berasal dari belanja-belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab./Kota) dibanding belanja yang dilakukan oleh satuan-satuan kerja pemerintah pusat di Sumatera Selatan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja belanja daerah memberikan dorongan terbesar untuk pertumbuhan ekonomi khususnya pada belanja final konsumsi pemerintah.

5. Tabungan Bruto (*Gross Saving*)

Tabungan Bruto (*Gross Saving*) s.d Triwulan III 2024 pada Lingkup Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar Rp27,434,227,684,014.00 yang mengalami kenaikan sebesar Rp5,838,546,411,737.00 atau 27,04% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp 21,595,681,272,277.00. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan kemampuan pemerintah untuk menghasilkan sisa Tabungan Bruto yang dapat dialokasikan untuk dilakukan investasi melalui optimalisasi pembiayaan.

Gross Saving Q3 2024



Kenaikan Tabungan Bruto terjadi pada semua level tingkatan pemerintahan, khususnya secara signifikan terjadi pada tingkat pemerintah provinsi dan kab/kota.

3. Analisis Indikator Pembiayaan

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis															
1.	Total Pembiayaan (<i>Total Financing</i>)	<p>Total Pembiayaan (<i>Total Financing</i>) s.d Triwulan III 2024 merupakan nilai yang sama dengan <i>Net Lending/ Net Borrowing</i> (selisih antara akuisisi aset keuangan neto dengan keterjadian kewajiban neto). Nilai <i>Net Lending</i> pada LO Statistik menunjukkan nilai positif yaitu sebesar Rp20,483,439,216,659.00. Dengan demikian, nilai <i>Net Lending</i> kenaikan sebesar Rp4,623,419,564,949.00 atau 29,15% dibandingkan periode yang sama tahun 2023 yaitu sebesar Rp15,860,019,651,710.00. Kenaikan nilai <i>Net Lending</i> dibandingkan tahun sebelumnya terjadi pada tingkatan pemerintahan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.</p> <div data-bbox="667 763 1412 1198" style="text-align: center;"> <p>Total Financing Q3 2024</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Government Level</th> <th>2024 (Rp)</th> <th>2023 (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>14.214,04</td> <td>13.044,48</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>20.483,44</td> <td>15.860,02</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>5.331,43</td> <td>2.431,58</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>937,98</td> <td>383,96</td> </tr> </tbody> </table> </div> <p><i>Net Lending/(Net Borrowing</i> tersebut pada seluruh tingkatan pemerintahan dilakukan optimalisasi melalui pembiayaan yaitu melalui Akuisisi Aset Keuangan Neto dan Keterjadian Kewajiban Neto.</p>	Government Level	2024 (Rp)	2023 (Rp)	central govt	14.214,04	13.044,48	general govt	20.483,44	15.860,02	local govt	5.331,43	2.431,58	provincial govt	937,98	383,96
Government Level	2024 (Rp)	2023 (Rp)															
central govt	14.214,04	13.044,48															
general govt	20.483,44	15.860,02															
local govt	5.331,43	2.431,58															
provincial govt	937,98	383,96															
2.	Pembiayaan Dalam Negeri (<i>Domestic Financing</i>)	<p>Pembiayaan Dalam Negeri (<i>Domestic Financing</i>) merupakan bentuk dari upaya optimalisasi <i>Net Lending (Net Borrowing)</i>. Pada triwulan III tahun 2024, <i>Net Lending</i> sebesar Rp Rp20,483,439,216,659.00 merupakan Transaksi Aset Keuangan dengan unit institusi residen dikurangi kewajiban dengan unit institusi residen yang seluruhnya bersumber dari debitur/kreditur dalam negeri.</p>															

		<p style="text-align: center;">Domestic Financing Q3 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Government Level</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>14,214,04</td> <td>13,044,48</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>20,483,44</td> <td>15,860,02</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>5,331,43</td> <td>2,431,58</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>937,98</td> <td>383,96</td> </tr> </tbody> </table>	Government Level	2024	2023	central govt	14,214,04	13,044,48	general govt	20,483,44	15,860,02	local govt	5,331,43	2,431,58	provincial govt	937,98	383,96
Government Level	2024	2023															
central govt	14,214,04	13,044,48															
general govt	20,483,44	15,860,02															
local govt	5,331,43	2,431,58															
provincial govt	937,98	383,96															
3.	Pembiayaan Luar Negeri (<i>Foreign Financing</i>)	Seluruh pembiayaan yang terjadi pada wilayah Sumatera Selatan merupakan Pembiayaan yang bersumber dari dalam Negeri. Pembiayaan melalui luar negeri hanya dilakukan pada level BA-BUN kemudian akan diteruskan pinjaman kepada Pemerintah Daerah.															

4. Analisis Indikator Kekayaan Utang

No	Jenis Analisis	Hasil Analisis															
1.	Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>)	<p>Jumlah Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>) pada wilayah Sumatera Selatan s.d Triwulan III 2024 adalah sebesar Rp 5,567,812,216,529.00. Utang tersebut terdapat pada seluruh tingkatan pemerintahan dan sebagian besar berupa kewajiban jangka pendek (Utang Transfer dan Belanja yang Masih Harus di Bayar)</p> <p style="text-align: center;">Gross Debt Q3 2024</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Government Level</th> <th>2024</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>central govt</td> <td>2,580,61</td> <td>2,437,30</td> </tr> <tr> <td>general govt</td> <td>5,567,81</td> <td>4,798,47</td> </tr> <tr> <td>local govt</td> <td>2,312,96</td> <td>1,578,46</td> </tr> <tr> <td>provincial govt</td> <td>1,833,54</td> <td>1,233,03</td> </tr> </tbody> </table>	Government Level	2024	2023	central govt	2,580,61	2,437,30	general govt	5,567,81	4,798,47	local govt	2,312,96	1,578,46	provincial govt	1,833,54	1,233,03
Government Level	2024	2023															
central govt	2,580,61	2,437,30															
general govt	5,567,81	4,798,47															
local govt	2,312,96	1,578,46															
provincial govt	1,833,54	1,233,03															
2.	Utang Netto (<i>Net Debt</i>)	<p>Nilai Utang Netto (<i>Net Debt</i>) pada wilayah Sumatera Selatan sama dengan nilai Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>), karena pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan tidak memiliki aset berupa <i>Monetary Gold & Special Drawings</i>. LSKP yang disusun pada level wilayah Sumatera Selatan saat ini hanya mencakup lingkup Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan tidak termasuk korporasi. Sebagai informasi tambahan bahwa <i>Monetary Gold</i> merupakan emas yang dimiliki dan disimpan sebagai aset cadangan oleh otoritas moneter (Bank Indonesia), sedangkan <i>Special Drawings</i> merupakan aset cadangan internasional yang diciptakan oleh IMF dan dialokasikan kepada negara anggotanya untuk melengkapi aset cadangan.</p>															

--	--	--

C. Lampiran

1. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

a. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Uraian	s.d Triwulan III Tahun 2024	s.d Triwulan III Tahun 2023
Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	314.05%	341.19%
Aset Lancar		
Kewajiban Jangka Pendek		
Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	40537.40%	27584.75%
Total Aset		
Kewajiban Jangka Panjang		

b. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah s.d Triwulan III Tahun 2024

No	Pemerintah Prov/Kan/Kota	Rasio									
		Kemandirian Keuangan Daerah		Solvabilitas Anggaran		Solvabilitas Layanan		Solvabilitas Operasional		Fleksibilitas Keuangan	
		2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
1	Prov. Sumatera Selatan	43.01%	53.32%	113.54%	103.67%	4,104,757.08	4,024,506.63	142.11%	169.05%	39.59%	64.50%
2	Kab. Musi Banyuasin	8.76%	7.40%	144.46%	161.87%	12,121,752.72	12,941,469.39	101.59%	182.20%	1.59%	70.63%
3	Kab. Ogan Komering Ulu	9.02%	6.03%	125.69%	89.67%	8,483,062.22	7,949,345.46	89.89%	91.34%	-10.11%	-8.66%
4	Kab. Muara Enim	7.09%	10.22%	156.09%	95.17%	14,400,722.94	12,108,818.03	138.17%	101.51%	37.91%	1.19%
5	Kab. Lahat	6.99%	7.72%	149.47%	132.44%	11,467,578.49	9,188,096.82	130.02%	151.46%	30.02%	51.46%
6	Kab. Musi Rawas	5.90%	6.26%	142.34%	133.41%	10,855,949.93	10,311,485.16	102.95%	145.28%	2.95%	45.28%
7	Kab. Ogan Komering Ilir	8.19%	6.29%	108.48%	110.14%	6,249,327.14	5,780,705.36	89.19%	105.89%	-10.81%	5.89%
8	Kab. Banyuasin	9.97%	11.18%	120.67%	123.56%	5,952,965.65	5,796,377.51	93.66%	137.12%	-7.45%	37.12%
9	Kab. OKU Timur	5.47%	6.03%	125.35%	113.27%	6,078,453.24	5,269,989.06	110.07%	122.66%	10.07%	22.66%
10	Kab. OKU Selatan	2.38%	4.67%	119.20%	98.29%	8,033,238.35	7,354,424.86	92.75%	98.41%	-9.93%	-5.39%
11	Kab. Ogan Ilir	5.41%	10.30%	126.11%	112.63%	7,874,997.21	6,224,144.73	101.07%	121.02%	1.07%	21.02%
12	Kab. Empat Lawang	4.77%	1.56%	137.00%	132.52%	8,697,221.08	7,620,832.31	108.58%	117.18%	8.58%	-4.01%
13	Kab. Pali	3.24%	4.39%	143.86%	160.21%	18,827,977.62	18,258,635.86	125.58%	179.41%	25.58%	79.41%
14	Kab. Musi Rawas Utara	3.75%	4.61%	183.66%	117.74%	15,149,368.79	12,918,917.53	146.50%	121.07%	46.50%	21.07%
15	Kota Palembang	33.94%	31.88%	133.61%	124.99%	11,015,018.50	10,235,496.29	111.93%	121.57%	10.66%	19.75%
16	Kota Prabumulih	9.54%	12.04%	136.58%	118.63%	13,373,034.61	13,169,586.67	98.55%	120.77%	-1.45%	20.77%
17	Kota Pagaralam	11.05%	10.26%	142.39%	137.78%	17,411,067.34	17,963,502.24	87.51%	133.39%	-12.49%	33.39%
18	Kota Lubuk Linggau	7.67%	9.02%	120.62%	129.14%	13,497,099.98	13,691,116.78	76.91%	126.38%	-25.35%	20.54%

	17.44%	20.67%	118.48%	129.73%	10,755,199.60	10,044,858.37	113.47%	138.03%	-10,57%	37,81%
--	--------	--------	---------	---------	---------------	---------------	---------	---------	---------	--------

2. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

a. Analisis Keseimbangan Fiskal

Analisis Keseimbangan Fiskal s.d Triwulan III Tahun 2024

(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Bruto	Pinjaman Neto	Keseimbangan Operasi Primer (NOB+Interest Expense)	Keseimbangan Primer
1	Pemerintah Pusat	17,298.71	17,298.71	14,214.04	17,298.71	14,214.04
2	Pemerintah Kab/Kota	8,679.28	8,679.28	5,331.43	8,699.48	5,351.62
3	Pemerintah Provinsi	1,648.73	1,648.73	937.98	1,651.39	940.63
4	Pemerintah Umum	27,626.72	27,626.72	20,483.44	27,649.57	20,506.29

Analisis Keseimbangan Fiskal s.d Triwulan III Tahun 2023

(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Bruto	Pinjaman Neto	Keseimbangan Operasi Primer (NOB+Interest Expense)	Keseimbangan Primer
1	Pemerintah Pusat	15,101.19	15,101.19	13,044.48	15,101.19	13,044.48
2	Pemerintah Kab/Kot	5,353.49	5,353.49	2,431.58	5,387.51	2,465.61
3	Pemerintah Provinsi	1,067.12	1,067.12	383.96	1,074.30	391.14
4	Pemerintah Umum	21,521.80	21,521.80	15,860.02	21,563.01	15,901.23

b. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya s.d Triwulan III Tahun 2024

(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Pajak Langsung	Pajak Tak Langsung	Pajak Modal	Belanja Konsumsi Final Pemerintah	Tabungan Bruto
1	Pemerintah Pusat	5,644.49	6,180.28	0.00	7,165.10	17,415.45
2	Pemerintah Kab/Kota	327.14	881.76	309.23	13,657.27	8,370.04
3	Pemerintah Provinsi	0.00	2,776.54	0.00	3,162.21	1,648.73
4	Pemerintah Umum	5,971.62	9,838.57	309.23	23,984.58	27,434.23

Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya s.d Triwulan III Tahun 2023
(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Pajak Langsung	Pajak Tak Langsung	Pajak Modal	Belanja Konsumsi Final Perintah	Tabungan Bruto
1	Pemerintah Pusat	4,901.78	6,120.97	0.00	5,948.25	15,380.87
2	Pemerintah Kab/Kota	179.93	729.97	205.79	11,322.11	5,147.69
3	Pemerintah Provinsi	0.00	2,823.33	0.00	2,855.74	1,067.12
4	Pemerintah Umum	5,081.71	9,674.27	205.79	20,126.11	21,595.68

c. Analisis Indikator Pembiayaan

Analisis Indikator Pembiayaan s.d Triwulan III Tahun 2024
(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Total Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Luar Negeri	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri
1	Pemerintah Pusat	14,214.04	14,214.04	0.00	0.00	0.00
2	Pemerintah Kab/Kota	5,331.43	5,331.43	0.00	0.00	0.00
3	Pemerintah Provinsi	937.98	937.98	0.00	0.00	0.00
4	Pemerintah Umum	20,483.44	20,483.44			

Analisis Indikator Pembiayaan s.d Triwulan III Tahun 2023
(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Total Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Luar Negeri	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri
1	Pemerintah Pusat	13,044.48	13,044.48	0.00	0.00	0.00
2	Pemerintah Kab/Kota	2,431.58	2,431.58	0.00	0.00	0.00
3	Pemerintah Provinsi	383.96	383.96	0.00	0.00	0.00
4	Pemerintah Umum	15,860.02	15,860.02			

d. Analisis Indikator Kekayaan Utang

Analisis Indikator Kekayaan Utang s.d Triwulan III Tahun 2024
(dalam miliar)

No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Utang Bruto	Utang Neto
1	Pemerintah Pusat	2,580.61	2,580.61
2	Pemerintah Kab/Kota	2,312.96	2,312.96
3	Pemerintah Provinsi	1,833.54	1,833.54
4	Pemerintah Umum	5,567.81	5,567.81

Analisis Indikator Kekayaan Utang s.d Triwulan III Tahun 2023
(dalam miliar)

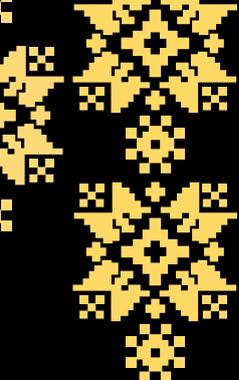
No.	Jenis Tingkatan Pemerintah	Utang Bruto	Utang Neto
1	Pemerintah Pusat	2,437.30	2,437.30
2	Pemerintah Kab/Kota	1,578.46	1,578.46
3	Pemerintah Provinsi	1,833.54	1,833.54
4	Pemerintah Umum	4,798.47	4,798.47

Palembang, Oktober 2024
Plh. Kepala Kantor Wilayah



Ditandatangani secara elektronik
Sugeng Hermanto





LAMPIRAN FACE LK



LAPORAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	30 SEP 2024	30 SEP 2023
A	Pendapatan Negara dan Hibah	22.493.098.497.086	19.184.411.930.101
A.1	Pendapatan Perpajakan	16.136.918.190.288	14.962.627.224.183
1	Pajak Dalam Negeri	15.937.995.443.208	14.704.824.496.941
2	Pajak Perdagangan Internasional	198.922.747.080	257.802.727.242
A.2	Pendapatan Bukan Pajak	6.348.581.707.499	4.170.366.785.549
1	Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-
2	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	341.515.786.467	394.723.858.871
3	Pendapatan Bukan Pajak Lainnya	1.288.675.757.396	882.455.148.449
4	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	2.327.674.062.665	796.230.591.365
5	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	-	-
6	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	-	-
7	Bantuan Keuangan - LRA	-	175.697.996.122
8	Pendapatan BLU	2.390.716.100.971	1.921.259.190.742
A.3	Pendapatan Hibah	7.598.599.299	51.417.920.369
1	Pendapatan Hibah Dalam Negeri	7.598.599.299	51.417.920.369
2	Pendapatan Hibah Luar Negeri	-	-
B	Belanja Pemerintah	38.419.395.332.118	32.940.753.172.172
1	Belanja Pegawai	14.645.841.557.787	12.671.531.206.164
2	Belanja Barang Dan Jasa	11.196.396.387.578	9.620.428.215.365
3	Belanja Modal	7.150.487.264.583	5.675.025.351.970
4	Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	22.852.534.778	41.208.238.339
5	Subsidi	11.496.645.550	9.325.905.826
6	Hibah	1.468.974.315.400	414.158.743.292
7	Belanja Bantuan Sosial	55.490.698.500	28.432.591.000
8	Belanja Lain-lain	9.373.743.225	2.998.790.982
9	Belanja Tak Terduga	-	-
10	Transfer	3.858.482.184.717	4.477.644.129.234
C	Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(15.926.296.835.032)	(13.756.341.242.071)
D	Pembiayaan	1.849.653.291.823	2.664.906.832.283
	Penerimaan Pembiayaan	2.054.415.442.522	3.103.566.759.524
	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	2.054.415.442.522	3.103.566.759.524
1	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	-	-
2	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Non Perbankan	-	-
3	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat	-	-
4	Penerimaan Pembiayaan - Pemda	2.054.312.242.522	3.103.566.759.524

NO	URAIAN	30 SEP 2024	30 SEP 2023
5	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	103.200.000	-
	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri		
	Pengeluaran Pembiayaan	204.762.150.699	438.659.927.241
	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	183.427.245.374	372.111.472.278
1	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan	39.117.276.522	143.616.813.612
2	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Non-Perbankan	141.170.710.787	176.355.400.601
3	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	3.139.258.065	3.139.258.065
4	Pembentukan Dana Cadangan		49.000.000.000
	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri		
	Penyertaan Modal Negara	21.334.905.325	66.548.454.963
E	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-(D+C)	(14.076.643.543.209)	(11.091.434.409.788)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	30 SEP 2024	30 SEP 2023
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	14.214.037.670.143	13.044.476.126.042
A.1	Pendapatan Perpajakan	11.842.256.001.878	11.023.602.236.738
1	Penerimaan Pajak Dalam Negeri	11.643.333.254.798	10.765.799.509.496
2	Pajak Perdagangan Internasional	198.922.747.080	257.802.727.242
A.2	Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2.371.781.668.265	2.020.873.889.304
1	Penerimaan Sumber Daya Alam		-
2	Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)		-
3	Pendapatan PNBPN Lainnya	715.893.634.301	671.029.841.916
4	Pendapatan BLU	1.655.888.033.964	1.349.844.047.388
A.3	Pendapatan Hibah	-	-
1	Hibah	-	-
B	BELANJA NEGARA	36.409.736.051.691	29.616.360.893.781
B.1	Belanja Pemerintah Pusat per Wilayah	12.475.233.997.709	9.914.112.666.798
1	Belanja Pegawai	4.546.273.878.622	3.873.333.216.953
2	Belanja Barang	4.815.658.194.613	3.962.038.065.393
3	Belanja Modal	3.089.395.325.974	2.066.217.890.452
4	Belanja Bantuan Sosial	23.906.598.500	12.523.494.000
B.2	Transfer ke Daerah dan Dana Desa	23.934.502.053.982	19.702.248.226.983
1	Transfer Ke Daerah	21.322.013.547.682	17.847.428.239.203
	Dana Transfer Umum	17.542.378.006.771	13.825.650.699.804
1.1	Transfer Dana Bagi Hasil	6.890.064.987.571	4.834.943.513.340
1.2	Transfer Dana Alokasi Umum	10.652.313.019.200	8.990.707.186.464
	Dana Transfer Khusus	3.779.635.540.911	3.979.526.420.399
1.3	Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik	615.432.161.247	804.105.975.535
1.4	Transfer Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.164.203.379.664	3.175.420.444.864
2	Insentif Fiskal	145.203.583.500	42.251.119.000
3	Dana Desa	2.467.284.922.800	1.854.819.987.780
C	Surplus (Defisit) Anggaran (A-B)	(22.195.698.381.548)	(16.571.884.767.739)
D	Pembiayaan	-	-
E	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SILPA/SIKPA	(22.195.698.381.548)	(16.571.884.767.739)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	30 SEP 2024	30 SEP 2023
A	Pendapatan Pemerintah Daerah	31.588.104.295.998	23.661.542.297.623
A.1	Pendapatan Asli Daerah	5.944.665.993.906	5.292.287.292.325
1	Pajak Daerah	4.294.662.188.410	3.939.024.987.445
2	Retribusi Daerah	107.497.287.080	75.765.373.056
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	341.515.786.467	394.723.858.871
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.200.990.731.949	882.773.072.953
A.2	Pendapatan Transfer	25.588.563.482.760	18.317.837.084.929
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	23.028.031.711.676	16.749.063.748.749
1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	2.593.379.873.786	1.937.597.321.690,00
1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	6.624.359.176.450	3.693.576.783.015,00
1.3	Dana Alokasi Umum	10.541.698.918.839	8.239.277.066.598,00
1.4	Dana Alokasi Khusus	3.268.593.742.601	2.878.612.577.446,00
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	2.560.531.771.084	1.568.773.336.180,00
2.1	Dana Penyesuaian	-	-
2.2	Dana Insentif Daerah	129.515.510.500	37.455.346.500,00
2.3	Dana Desa	2.431.016.260.584	1.531.317.989.680,00
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/Provinsi	-	-
3.1	Bagi Hasil Pajak	-	-
4	Transfer Bantuan Keuangan	-	-
A.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	54.874.819.332	51.417.920.369
1	Pendapatan Hibah	7.598.599.299	51.417.920.369
2	Pendapatan Lainnya	47.276.220.033	-
B	Belanja Negara	25.318.702.749.482	20.845.998.771.955
B.1	Belanja Operasi	18.015.213.467.857	14.937.190.123.640
1	Belanja Pegawai	10.099.567.679.165	8.798.197.989.211
2	Belanja Barang dan Jasa	6.380.738.192.965	5.658.390.149.972
3	Belanja Bunga	22.852.534.778	41.208.238.339
4	Subsidi	11.496.645.550	9.325.905.826
5	Hibah	1.468.974.315.400	414.158.743.292
6	Bantuan Sosial	31.584.100.000	15.909.097.000
B.2	Belanja Modal	4.061.091.938.609	3.608.807.461.518
1	Belanja Modal Tanah	23.412.066.915	9.190.174.898
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	477.272.767.728	535.485.279.222
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	757.565.111.384	724.312.585.719
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	2.610.270.606.725	2.248.690.962.237
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	153.461.008.092	70.693.137.735
6	Belanja Modal Aset Lainnya	17.107.005.941	3.289.720.464
7	Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	-	13.015.571.731

NO	URAIAN	30 SEP 2024	30 SEP 2023
8	Belanja Modal BLUD	22.003.371.824	4.130.029.512
B.3	Belanja Tak Terduga	9.373.743.225	2.998.790.982
1	Belanja Tak Terduga	9.373.743.225	2.998.790.982
C	Transfer	3.233.023.599.790	2.297.002.395.815
C.1	Transfer/Bagi Hasil Pendapatan	18.976.222.169	9.287.941.457
1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	17.796.288.942	8.489.124.142
2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.179.933.227	798.817.315
C.2	Transfer Bantuan Keuangan	3.214.047.377.621	2.287.714.454.358
1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya	193.027.991.000	99.234.261.366
2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	3.021.019.386.621	2.188.480.192.992
3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-
D	Surplus (Defisit) Anggaran (A - B - C)	6.269.401.546.516	2.815.543.525.668
E	Pembiayaan	1.849.653.291.823	2.664.906.832.283
E.1	Penerimaan Pembiayaan	2.054.415.442.522	3.103.566.759.524
1	Penggunaan SiLPA	2.054.312.242.522	3.103.566.759.524
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-
4	Pinjaman Dalam Negeri	-	-
5	Penerimaan Kembali Piutang	103.200.000	-
6	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
E.2	Pengeluaran Pembiayaan	204.762.150.699	438.659.927.241
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	49.000.000.000
2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	21.334.905.325	66.548.454.963
3	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	183.427.245.374	323.111.472.278
4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
5	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
F.	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+E)	8.119.054.838.339	5.480.450.357.951

NERACA PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	30 SEP 2024	31 DES 2023
A	ASET	335.060.763.075.166	327,838,239,333,581
A.1	Aset Lancar	20.116.256.502.768	11,043,323,721,666
1	Kas dan setara kas	11.572.135.740.100	4,002,484,291,800
2	Uang muka rekening BUN-khusus pusat	-	
3	Investasi jangka pendek	1.073.256.605.000	1,051,506,605,000
4	Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja	53.177.773.852	63,136,441,773
5	Piutang	4.211.908.786.026	2,660,890,268,011
	Piutang Perpajakan	3.088.749.153.826	1,531,771,882,443
	Piutang Bukan Pajak	2.679.674.935.186	2,683,412,232,490
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	34.088.287.598	34,088,287,598
	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	94.643.125	163,438,057
	Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman	-	-
	Piutang lain-lain	37.224.993.695	129,303,159,271
	Penyisihan piutang tak tertagih	(1.627.923.227.403)	(1,717,848,731,847)
6	Persediaan	3.205.777.597.790	3,265,306,115,081
7	Piutang PFK	-	
A.2	Investasi jangka panjang	11.189.048.890.384	11,167,713,985,059
1	Investasi jangka panjang non permanen	388.603.437	388,603,437
2	Investasi jangka panjang permanen	11.188.660.286.947	11,167,325,381,622
3	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	-	-
A.3	Aset Tetap	294.237.065.338.215	295,577,688,451,749
1	Tanah	158.651.088.411.422	158,875,385,679,065
2	Peralatan dan Mesin	32.892.538.899.785	31,968,908,386,269
3	Gedung dan Bangunan	42.394.095.565.742	41,493,699,941,289
4	Jalan, irigasi, dan jaringan	157.511.523.316.733	154,651,488,539,999
5	Aset tetap lainnya	3.332.015.790.790	3,236,391,960,635
6	Konstruksi dalam pengerjaan	9.678.526.386.728	6,946,191,680,422
7	Konsesi Jasa	4.538.098.166.491	4,426,089,970,939
8	Akumulasi penyusutan	(114.798.905.138.481)	(106,020,467,706,869)
9	Aset Tetap Yang Belum Diregister	38.083.939.005	-
A.4	Properti Investasi	17.823.110.746	17,850,712,407
A.5	Dana Cadangan	-	101,613,577,486
1	Dana Cadangan	-	101,613,577,486
A.6	Piutang Jangka Panjang	48.572.293.696	48,603,648,319
1	Tagihan piutang penjualan angsuran	677.831.617	677,584,853
2	Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	40.728.340.443	40,723,200,105
3	Piutang jangka panjang kredit pemerintah	-	-
4	Piutang jangka panjang lainnya	7.333.671.295	7,370,375,295
5	Penyisihan piutang jangka panjang	(167.549.660)	(167,511,934)

NO	URAIAN	30 SEP 2024	31 DES 2023
A.7	Aset Lainnya	9.451.996.939.356	9,881,445,236,895
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	1.577.898.679.365	1,574,550,737,140
2	Aset tidak berwujud	810.333.601.615	777,433,893,318
3	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	3.069.521.691	456,382,892,008
4	Dana Penjaminan	-	
5	Dana Kelolaan BLU	-	
6	Aset lain-lain	7.899.968.211.971	7,978,829,054,426
7	Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya		
8	Aset Lainnya Penerusan Pinjaman		
9	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(839.273.075.285)	(905,751,339,997)
B	KEWAJIBAN/UTANG	5.567.812.216.530	5,515,557,898,498
B.1	Kewajiban Jangka Pendek	3.806.493.623.844	3,729,306,852,107
1	Utang perhitungan pihak ketiga	9.199.938.898	9,199,938,898
2	Utang kepada pihak ketiga	2.434.836.861.645	2,360,194,614,047
3	Utang bunga	2.096.014.473	2,096,014,473
4	Utang subsidi		
5	Utang Transfer	51.159.098.950	1,242,737,152
6	Bagian lancar utang jangka panjang	101.365.932.588	216,241,699,487
7	Utang surat perbendaharaan negara		-
8	Utang Yang Belum Ditagihkan	142.592.217.494	-
9	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	271.344.347.441	315,749,800,727
10	Pendapatan Diterima Dimuka	11.655.037.352	42,576,451,991
11	Uang Muka	656.462.268	525,975,970
12	Utang Jangka Pendek Lainnya	781.587.712.736	781,479,619,362
B.2	Kewajiban Jangka Panjang	1.761.318.592.685	1,786,251,046,391
1	Utang jangka panjang dalam negeri	308.450.538.297	346,568,452,394
2	Utang jangka panjang luar negeri	-	-
B.3	Kewajiban Konsesi Jasa	1.452.868.054.388	1,439,682,593,997
1	Kewajiban Konsesi Jasa	1.452.868.054.388	1,439,682,593,997
C	EKUITAS	329.492.950.858.636	322,322,681,435,083

NERACA PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	30 SEP 2024	31 DES 2023
A	ASET	211.182.945.551.997	207.159.322.664.521
A.1	Aset lancar	9.222.173.779.018	5.921.315.851.417
1	Kas dan Setara Kas	3.453.080.901.761	1.655.504.306.963
1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	39.006.380.772	1.182.438.238
1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	15.552.751	350.128.001
1.3	Kas Lainnya dan Setara Kas	1.954.900.978.444	556.006.268.449
1.4	Kas pada BLU	1.459.157.989.794	1.097.965.472.275
2	Investasi Jangka Pendek/BLU (Investasi dalam Deposito)	327.650.000.000	305.900.000.000
3	Belanja dibayar di muka	6.629.366.049	11.766.239.062
4	Uang Muka Belanja	14.176.350	32.409.076
5	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	5.124.277.120	9.927.839.302
6	Piutang	2.925.597.290.768	1.374.578.772.753
6.1	Piutang Pajak	3.088.749.153.826	1.531.771.882.443
6.2	Piutang Bukan Pajak	698.431.001.661	702.168.298.965
6.3	Bagian Lancar TP/TGR	94.643.125	163.438.057
6.4	Piutang dari KUN (Uang Muka yang Akan Diterima)	27.000.000	-
6.5	Piutang dari Kegiatan BLU	34.945.805.251	127.050.970.827
6.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(896.650.313.095)	(986.575.817.539)
7	Persediaan	2.503.693.018.446	2.563.606.284.261
8	Persediaan Belum Diregister	384.748.524	-
A.2	Investasi Jangka Panjang		
A.3	Aset Tetap	201.274.578.979.949	200.105.199.760.310
1	Tanah	133.444.542.503.078	133.692.251.837.636
2	Peralatan dan Mesin	15.388.534.671.435	14.942.176.925.648
3	Gedung dan Bangunan	13.605.899.516.932	13.463.069.003.863
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	69.684.328.053.464	69.434.563.883.455
5	Aset Tetap Lainnya	566.170.228.965	624.007.406.902
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	8.140.633.345.183	5.408.298.638.877
7	Aset Tetap Belum Diregister	38.083.939.005	-
	Aset Konsesi Jasa	4.538.098.166.491	4.426.089.970.939
8	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(44.131.711.444.604)	(41.885.257.907.010)
A.4	Properti Investasi	17.823.110.746	17.850.712.407
A.5	Piutang Jangka Panjang	7.332.688.952	7.366.774.689
1	Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	166.567.317	163.911.328
2	Piutang Jangka Panjang Lainnya	7.333.671.295	7.370.375.295
3	Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	(167.549.660)	(167.511.934)
A.6	Aset Lainnya	661.036.993.332	1.107.589.565.698
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-
2	Aset Tak Berwujud	299.122.713.744	268.611.734.627

No	URAIAN	30 SEP 2024	31 DES 2023
3	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	3.069.521.691	456.382.892.008
4	Aset Lain-lain	886.226.494.507	978.010.778.781
5	Akumulasi Penyusutan	(527.381.736.610)	(595.415.839.718)
5.1	Akum. Penyusutan Aset Lain-lain	(408.653.523.883)	(485.934.665.636)
5.2	Akum. Amortisasi Aset Lainnya	(118.728.212.727)	(109.481.174.082)
B	KEWAJIBAN	2.580.608.548.648	2.375.360.549.620
B.1	Kewajiban Jangka Pendek	1.127.738.739.034	935.676.200.397
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	650.206.666.843	575.564.419.245
2	Utang Transfer	51.159.098.950	1.242.737.152
3	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	271.344.347.441	315.749.800.727
4	Uang Jangka Pendek Lainnya	141.320.266.694	-
5	Hibah Yang Belum Disahkan	1.396.859.486	
6	Pendapatan Diterima Dimuka	11.655.037.352	42.576.451.991
7	Uang Muka dari KPPN	656.462.268	525.975.970
B.2	Kewajiban Jangka Panjang	1.452.869.809.614	1.439.684.349.223
1	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	1.755.226	1.755.226
2	Kewajiban Konsesi Jasa	1.452.868.054.388	1.439.682.593.997
C	EKUITAS	208.602.337.003.349	204.783.962.114.901
D	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	211.182.945.551.997	207.159.322.664.521
	Selisih Aset = Kewajiban dan Ekuitas		

**NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

NO.	URAIAN	30 SEP 2024	31 DES 2023
A	ASET	123.877.817.523.170	120.678.916.669.060
A.1	ASET LANCAR	10.894.082.723.753	5.122.007.870.249
1	Kas dan Setara Kas	8.119.054.838.340	2.346.979.984.837
1.1	Kas di Kas Daerah	6.394.732.215.068	745.606.605.000
1.2	Kas di Bendahara Penerimaan	6.233.903.036	392.393.832
1.3	Kas di Bendahara Pengeluaran	12.343.803.221	1.053.942.878
1.4	Kas di BLUD	1.038.099.648.366	206.399.240.518
1.5	Kas Lainnya	667.645.268.649	94.995.540.421
1.6	Setara Kas	-	-
2	Investasi Jangka Pendek	745.606.605.000	745.606.605.000
3	Piutang Pendapatan	1.981.243.933.525	1.981.243.933.525
4	Piutang Lainnya	36.340.476.042	36.340.476.042
5	Penyisihan Piutang	(731.272.914.308)	(731.272.914.308)
5	Beban Dibayar Dimuka	41.409.954.333	41.409.954.333
7	Persediaan	701.699.830.820	701.699.830.820
A.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	11.189.048.890.384	11.167.713.985.059
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	388.603.437	388.603.437
1.1	Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya		
1.2	Dana Bergulir	1.200.627.140	1.200.627.140
1.3	Cadangan Dana Bergulir	(812.023.703)	(812.023.703)
1.4	Investasi Non Permanen Lainnya	-	-
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	11.188.660.286.947	11.167.325.381.622
2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.188.660.286.947	11.167.325.381.622
2.2	Investasi Permanen Lainnya	-	-
A.3	ASET TETAP	92.962.486.358.266	95.472.488.691.439
1	Tanah	25.206.545.908.344	25.183.133.841.429
2	Peralatan dan Mesin	17.504.004.228.350	17.026.731.460.621
3	Gedung dan Bangunan	28.788.196.048.810	28.030.630.937.426
4	Jalan. Irigasi dan Jaringan	87.827.195.263.269	85.216.924.656.544
5	Aset Tetap Lainnya	2.765.845.561.825	2.612.384.553.733
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.537.893.041.545	1.537.893.041.545
7	Akumulasi Penyusutan	-70.667.193.693.877	(64.135.209.799.859)
	Akumulasi Penyusutan-Peralatan dan Mesin	(13.841.007.042.653)	(12.539.345.241.709)
	Akumulasi Penyusutan-Gedung dan Bangunan	(6.733.174.386.106)	(6.121.067.623.733)
	Akumulasi Penyusutan-Jalan, Irigasi dan Jaringan	(50.031.066.441.493)	(45.419.584.608.030)
	Akumulasi Penyusutan-Aset Tetap Lainnya	(61.945.823.625)	(55.212.326.387)
A.4	Dana Cadangan	-	101.613.577.486

NO.	URAIAN	30 SEP 2024	31 DES 2023
A.5	ASET LAINNYA	8.832.199.550.768	8.815.092.544.827
1	Tagihan Jangka Panjang	41.239.604.744	41.236.873.630
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1.577.898.679.365	1.574.550.737.140
3	Aset Tidak Berwujud	199.319.549.196	198.486.658.412
4	Aset Lain-lain	7.013.741.717.464	7.000.818.275.645
5	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(311.891.338.675)	(310.335.500.279)
B	KEWAJIBAN	2.987.203.667.882	3.140.197.348.878
B.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2.678.754.884.810	2.793.630.651.710
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	9.199.938.898	9.199.938.898
2	Utang Bunga	2.096.014.473	2.096.014.473
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	101.365.932.588	216.241.699.487
4	Pendapatan Diterima Dimuka	20.437.843.112	20.437.843.112
5	Utang Belanja	1.784.630.194.802	1.784.630.194.802
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	761.024.960.938	761.024.960.938
B.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	308.448.783.071	346.566.697.168
1	Utang Dalam Negeri	308.448.783.071	346.566.697.168
2	Utang Jangka Panjang Lainnya		
C	EKUITAS	120.890.613.855.287	117.538.719.320.182
D	JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN	123.877.817.523.169	120.678.916.669.060
Selisih Aset = Kewajiban dan Ekuitas			

**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	30 SEP 2024	30 SEP 2023
A	KEGIATAN OPERASIONAL		
A.1	PENDAPATAN OPERASIONAL	47.473.183.552.383	38.940.122.262.303
1	Pendapatan Perpajakan-LO	16.693.929.088.160	14.904.128.871.199
1.1	Pendapatan pajak dalam negeri-LO	16.524.786.029.486	14.689.662.445.865
1.2	Pendapatan pajak perdagangan internasional-LO	169.143.058.674	214.466.425.334
2	Pendapatan Bukan Pajak-LO	1.506.566.438.846	2.059.446.323.463
2.1	Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-
2.2	Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	341.515.786.467	394.723.858.871
2.3	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1.165.050.652.378	1.664.722.464.592
3	Pendapatan Transfer- LO	2.329.755.150.647	796.230.591.365
3.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	2.327.674.062.665	796.230.591.365
3.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		-
3.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO		-
3.4	Bantuan Keuangan - LO	2.081.087.982	-
4	Pendapatan BLU -LO	2.355.163.483.865	1.347.914.472.378
4.1	Pendapatan Jasa BLU - LO	2.270.160.055.804	1.286.242.168.570
4.2	Pendapatan Hibah BLU - LO	1.891.203.066	1.029.337.950
4.3	Pendapatan Lainnya BLU - LO	83.112.224.995	60.642.965.858
5	Pendapatan Hibah-LO	596.773.198.002	69.021.381.855
5.1	Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO	596.773.198.002	69.021.381.855
6	Pendapatan lainnya-LO	23.990.996.192.863	19.763.380.622.043
6.1	Pendapatan Penyesuaian Akruak	6.577.777.083	-
6.2	Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	23.984.418.415.780	19.763.380.622.043
A.2	BEBAN OPERASIONAL	43.951.136.650.911	32.388.182.233.865
1	Beban Pegawai	15.395.983.677.135	13.336.440.480.430
2	Beban Persediaan	396.150.252.629	388.557.232.720
3	Beban Barang dan Jasa	11.361.892.961.896	9.331.944.569.234
4	Beban Bunga	22.852.534.778	41.208.238.339
5	Beban Subsidi	11.496.645.550	9.325.905.826
6	Beban Hibah	1.468.974.315.400	414.158.743.292
7	Beban Bantuan Sosial	55.554.739.000	28.851.955.500
8	Beban Lain-lain		
9	Beban Akruak Lainnya	8.908.846.981.508	2.767.600.594.550
10	Beban Transfer	6.329.384.543.015	6.070.094.513.974
A.3	Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional	3.522.046.901.472	6.551.940.028.438
B	KEGIATAN NON OPERASIONAL		
B.1	Surplus (Defisist) Pempus Selisih Kurs Belum Terealisasi	244.041.534	-

NO	URAIAN	30 SEP 2024	30 SEP 2023
B.1	Surplus/(Defisit) Penpus Pelepasan Aset Non Lancar	(62.238.357.504)	(58.154.663.771)
B.2	Surplus/(Defisit) Penpus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
B.3	Surplus/(Defisit) Penpus Kegiatan Non Operasional Lainnya	63.804.440.121	121.848.902.079
B.4	Surplus/(Defisit) Pemda Penjualan Aset Non Lancar	-	-
B.5	Surplus (Defisit) Pemda Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
B.6	Surplus (Defisit) Pemda Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-
	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.810.124.151	63.694.238.308
C	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	3.523.857.025.623	6.615.634.266.746
	POS LUAR BIASA	-	-
D	SURPLUS/(DEFISIT) LO	3.523.857.025.623	6.615.634.266.746

**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	30 SEP 2024	30 SEP 2023
A	KEGIATAN OPERASIONAL		
A.1	PENDAPATAN OPERASIONAL	39.204.152.989.524	32.800.186.458.244
1	PENDAPATAN PERPAJAKAN	12.399.266.899.750	10.965.103.883.754
1.1	Pendapatan Pajak Penghasilan	5.783.250.727.742	5.439.642.480.560
1.2	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	4.162.278.701.343	4.109.974.517.292
1.3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	2.148.768.394.938	1.055.263.173.939
1.4	Pendapatan Cukai	133.413.000	268.915.000
1.5	Pendapatan Pajak Lainnya	135.692.604.053	145.131.398.792
1.6	Pendapatan Bea Masuk	115.953.593.674	105.125.183.334
1.7	Pendapatan Bea Keluar	53.189.465.000	109.341.242.000
1.8	Pendapatan Pajak Lain-lain	-	356.972.837
2	PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	2.231.293.075.291	2.054.098.490.961
2.1	Pendapatan BLU	1.620.335.416.858	1.347.914.472.378
2.2	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	610.957.658.433	706.184.018.583
3	PENDAPATAN HIBAH	589.174.598.703	17.603.461.486
4	PENDAPATAN PENYESUAIAN	23.984.418.415.780	19.763.380.622.043
4.1	Pendapatan Dropping Dana Tranfer	23.984.418.415.780	19.763.380.622.043
A.2	BEBAN OPERASIONAL	36.593.267.434.682	30.720.700.266.736
1	Beban Pegawai	5.296.415.997.970	4.538.242.491.219
2	Beban Persediaan	396.150.252.629	388.542.504.720
3	Beban Barang dan Jasa	2.728.081.630.786	2.093.946.835.575
4	Beban Pemeliharaan	547.023.392.773	414.119.295.766
5	Beban Perjalanan Dinas	468.520.036.366	353.924.399.096
6	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	771.823.981.888	388.000.665.267
7	Beban Bantuan Sosial	23.970.639.000	12.942.858.500
8	Beban Lain-lain	-	-
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	2.370.730.509.485	2.494.839.306.295
10	Beban Penyusutan Piutang Tak Tertagih	6.132.578.005	272.761.288.255
11	Beban Transfer	23.984.418.415.780	19.763.380.622.043
A.3	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	2.610.885.554.842	2.079.486.191.508
B	KEGIATAN NON OPERASIONAL		
B.1	SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	(62.238.357.504)	58.154.663.771
1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	4.725.312.971	3.330.222.101
2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	66.963.670.475	61.484.885.872
B.2	SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-

LKPK & LSKP Tahun 2024 Triwulan III

NO	URAIAN	30 SEP 2024	30 SEP 2023
1	Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
2	Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-
B.3	SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	64.048.481.655	121.848.902.079
1	Pendapatan dari Kegiatan non Operasional Lainnya	77.703.092.714	175.874.271.382
2	Beban dari Kegiatan non Operasional Lainnya	13.654.611.059	54.025.369.303
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	1.810.124.151	63.694.238.308
C	SURPLUS/(DEFISIT) LO	2.612.695.678.993	2.143.180.429.816

**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

NO	URAIAN	30 SEP 2024	30 SEP 2023
A	KEGIATAN OPERASIONAL		
A.1	PENDAPATAN	29.157.088.035.414	22.130.224.307.943
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.944.665.993.906	5.292.287.292.325
1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	4.294.662.188.410	3.939.024.987.445
1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	107.497.287.080	75.765.373.056
1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	341.515.786.467	394.723.858.871
1.4	Lain-lain PAD yang sah-LO	1.200.990.731.949	882.773.072.953
2	PENDAPATAN TRANSFER	23.157.547.222.176	16.786.519.095.249
2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	23.028.031.711.676	16.749.063.748.749
2.1.1	Bagi Hasil Pajak	-	1.937.597.321.690,00
2.1.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	-	3.693.576.783.015,00
2.1.3	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	8.239.277.066.598,00
2.1.4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	-	2.878.612.577.446,00
2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -LO	129.515.510.500	37.455.346.500,00
2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya -LO	-	-
2.4	Bantuan Keuangan		-
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	54.874.819.332	51.417.920.369
3.1	Pendapatan Hibah	7.598.599.299	51.417.920.369
3.2	Pendapatan Lainnya	47.276.220.033	-
A.2	BEBAN	28.245.926.688.784	17.657.770.471.013
1	BEBAN OPERASI	25.012.903.088.994	15.360.768.075.198
1.1	Beban Pegawai	10.099.567.679.165	8.798.197.989.211
1.2	Beban Barang dan Jasa	6.846.443.920.083	6.081.968.101.530
1.3	Beban Bunga	22.852.534.778	41.208.238.339
1.4	Beban Subsidi	11.496.645.550	9.325.905.826
1.5	Beban Hibah	1.468.974.315.400	414.158.743.292
1.6	Beban Bantuan Sosial	31.584.100.000	15.909.097.000
1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	6.531.983.894.018	-
1.8	Beban Penyisihan Piutang	-	-
1.9	Beban Lain-lain	-	-
2	BEBAN TRANSFER	3.233.023.599.790	2.297.002.395.815
2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	17.796.288.942	8.489.124.142
2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	1.179.933.227	798.817.315
2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan Daerah ke Pemda Lainnya	193.027.991.000	99.234.261.366
2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	3.021.019.386.621	2.188.480.192.992
2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-
A.3	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	911.161.346.630	4.472.453.836.930

NO	URAIAN	30 SEP 2024	30 SEP 2023
B	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	-	-
B.1	SURPLUS NON OPERASIONAL	-	-
1	Surplus penjualan aset non lancar	-	-
2	Surplus penyelesaian kewajiban jangka panjang	-	-
3	Surplus dari kegiatan non operasional lainnya	-	-
B.2	DEFISIT NON OPERASIONAL	-	-
1	Defisit penjualan aset non lancar	-	-
2	Defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang	-	-
3	Defisit dari kegiatan non operasional lainnya	-	-
		-	-
C	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	911.161.346.630	4.472.453.836.930
D	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	911.161.346.630	4.472.453.836.930
D.1	PENDAPATAN LUAR BIASA	-	-
D.2	BEBAN LUAR BIASA	-	-
E	SURPLUS/DEFISIT-LO	911.161.346.630	4.472.453.836.930

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024 DAN 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	JUMLAH	
		30 SEP 2024	30 SEP 2023
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :			
A1	Pendapatan	58.895.629.158.690	48.787.528.330.268
A11	Pajak	16.119.430.050.133	14.961.771.870.448
A12	Kontribusi Sosial	-	-
A13	Hibah	2.332.464.062.665	844.071.051.888
A14	Pendapatan Lainnya	40.443.735.045.892	32.981.685.407.932
A2	Beban	31.268.908.067.534	27.265.727.820.202
A21	Kompensasi Pegawai	15.117.206.858.032	13.055.896.114.421
A22	Penggunaan Barang dan Jasa ¹⁾	10.193.439.294.252	8.603.556.339.748
A23	Konsumsi Aset Tetap	-	-
A24	Bunga	22.852.534.778	41.208.238.339
A25	Subsidi	11.496.645.550	9.325.905.826
A26	Hibah	4.149.194.214.651	4.517.284.947.441
A27	Manfaat Sosial	55.490.698.500	28.432.591.000
A28	Beban Lainnya	1.719.227.821.772	1.010.023.683.427
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	27.626.721.091.156	21.521.800.510.066
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	27.626.721.091.156	21.521.800.510.066
Transaksi Aset Non Keuangan :			
A30	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	7.143.281.874.497	5.661.780.858.356
A301	Aset Tetap	7.097.072.482.082	5.640.289.403.319
A302	Perubahan Persediaan	-	-
A303	Barang Berharga	-	-
A304	Aset Non Produksi	46.209.392.415	21.491.455.037
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-30)	20.483.439.216.659	15.860.019.651.710
Transaksi Aset Keuangan Dan Kewajiban (Pembiayaan) :			
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	20.300.011.971.285	15.536.908.179.432
A321	Dalam Negeri	20.300.011.971.285	15.536.908.179.432
A322	Luar Negeri	-	-
A323	Monetary gold and SDRs	-	-
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(183.427.245.374)	(323.111.472.278)
A330	Dalam Negeri	(183.427.245.374)	(323.111.472.278)
A332	Luar Negeri	-	-
Pemeriksaan Vertikal: Perbedaan antara Saldo Neto Peminjaman / Pinjaman dengan Pembiayaan (1-2-30=32-33-NLBz=0)			

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024 30 SEPTEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	JUMLAH	
		30 SEP 2024	30 SEP 2023
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :			
A1	Pendapatan	50.619.048.408.863	42.651.336.431.282
A11	Pajak	11.824.767.861.723	11.022.746.883.003
A12	Kontribusi Sosial	-	-
A13	Hibah	-	-
A14	Pendapatan Lainnya	38.794.280.547.140	31.628.589.548.279
A2	Beban	33.320.340.725.717	27.550.143.003.329
A21	Kompensasi Pegawai	5.017.639.178.867	4.257.698.125.210
A22	Penggunaan Barang dan Jasa ¹⁾	3.928.099.899.056	3.126.182.512.699
A23	Konsumsi Aset Tetap	-	-
A24	Bunga	-	-
A25	Subsidi	-	-
A26	Hibah	23.934.502.053.982	19.702.248.226.983
A27	Manfaat Sosial	23.906.598.500	12.523.494.000
A28	Beban Lainnya	416.192.995.312	451.490.644.437
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	17.298.707.683.146	15.101.193.427.953
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	17.298.707.683.146	15.101.193.427.953
TRANSAKSI ASET NON KEUANGAN :			
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	3.084.670.013.003	2.056.717.301.911
A311	Aset Tetap	3.061.872.687.503	2.044.416.021.772
A312	Perubahan Persediaan	-	-
A313	Barang Berharga	-	-
A314	Aset Non Produksi	22.797.325.500	12.301.280.139
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-30)	14.214.037.670.143	13.044.476.126.042
TRANSAKSI ASET KEUANGAN DAN KEWAJIBAN (PEMBIAYAAN) :			
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	14.214.037.670.143	13.044.476.126.042
A321	Dalam Negeri	14.214.037.670.143	13.044.476.126.042
A322	Luar Negeri	-	-
A323	Monetary gold and SDRs	-	-
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	-	-
A330	Dalam Negeri	-	-
A332	Luar Negeri	-	-
Pemeriksaan Vertikal: Perbedaan antara Saldo Neto Peminjaman / Pinjaman dengan Pembiayaan (1-2-30=32-33-NLBz=0)			

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	JUMLAH	
		30 SEP 2024	30 SEP 2023
TRANSAKSI YANG MEMPENGARUHI KEKAYAAN BERSIH :			
A1	Pendapatan	34.079.136.789.446	25.608.283.967.766
A11	Pajak	4.294.662.188.410	3.939.024.987.445
A12	Kontribusi Sosial	-	-
A13	Hibah	27.831.191.485.770	19.967.733.604.375
A14	Pendapatan Lainnya	1.953.283.115.265	1.701.525.375.946
A2	Beban	23.751.123.381.436	19.187.676.885.653
A21	Kompensasi Pegawai	10.099.567.679.165	8.798.197.989.211
A22	Penggunaan Barang dan Jasa ¹⁾	6.265.339.395.196	5.477.373.827.049
A23	Konsumsi Aset Tetap	-	-
A24	Bunga	22.852.534.778	41.208.238.339
A25	Subsidi	11.496.645.550	9.325.905.826
A26	Hibah	6.017.248.200.288	4.287.128.789.238
A27	Manfaat Sosial	31.584.100.000	15.909.097.000
A28	Beban Lainnya	1.303.034.826.460	558.533.038.990
GOB	Saldo Operasi Bruto (1-2+23+NOBz)	10.328.013.408.010	6.420.607.082.113
NOB	Saldo Operasi Neto (1-2+NOBz)	10.328.013.408.010	6.420.607.082.113
Transaksi Aset Non Keuangan :			
A31	Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	4.058.611.861.494	3.605.063.556.445
A311	Aset Tetap	4.035.199.794.579	3.595.873.381.547
A312	Perubahan Persediaan	-	-
A313	Barang Berharga	-	-
A314	Aset Non Produksi	23.412.066.915	9.190.174.898
NLB	Saldo Peminjaman / Pinjaman Neto (1-2+NOBz-30)	6.269.401.546.516	2.815.543.525.668
Transaksi Aset Keuangan Dan Kewajiban (Pembiayaan) :			
A32	Akuisisi Neto Aset Keuangan	6.085.974.301.142	2.492.432.053.390
A321	Dalam Negeri	6.085.974.301.142	2.492.432.053.390
A322	Luar Negeri	-	-
A323	Monetary gold and SDRs	-	-
A33	Keterjadian Kewajiban Neto	(183.427.245.374)	(323.111.472.278)
A331	Dalam Negeri	(183.427.245.374)	(323.111.472.278)
A332	Luar Negeri	-	-

Pemeriksaan Vertikal: Perbedaan antara Saldo Neto Peminjaman / Pinjaman dengan Pembiayaan (1-2-30=32-33-NLBz=0)		
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	30 SEP 2024	31 DES 2023
6	KEKAYAAN BERSIH	331.121.041.635.699	324,040,697,678,865
61	Aset Non Keuangan	305.331.694.785.051	306,711,356,886,984
611	Aset Tetap	143.444.416.864.926	144,540,350,181,924
6111	Gedung dan Bangunan	125.188.160.154.836	125,536,680,620,320
6112	Peralatan dan Mesin	7.056.979.986.506	7,987,605,733,833
6113	Aset Tetap Lainnya	11.199.276.723.584	11,016,063,827,771
612	Persediaan	3.205.777.597.790	3,265,306,115,081
614	Aset Nonproduksi	158.681.500.322.335	158,905,700,589,978
6141	Tanah	158.651.088.411.422	158,875,385,679,065
6144	Aset Tak Berwujud	30.411.910.913	30,314,910,913
62	Aset Keuangan	31.357.159.067.178	22,844,898,690,378
6202	Uang dan Deposito	12.320.811.866.791	5,306,087,366,294
6203	Surat Berharga Selain Saham	328.038.603.437	306,288,603,437
6204	Pinjaman	-	-
6205	Saham dan Ekuitas Lain	11.188.660.286.947	11,167,325,381,622
6208	Piutang Lainnya	7.519.648.310.002	6,065,197,339,025
621	Aset Keuangan Domestik	31.357.159.067.178	22,844,898,690,378
6212	Uang dan Deposito	12.320.811.866.791	5,306,087,366,294
6213	Surat Berharga Selain Saham	328.038.603.437	306,288,603,437
6214	Pinjaman	-	-
6215	Saham dan Ekuitas Lain	11.188.660.286.947	11,167,325,381,622
6218	Piutang Lainnya	7.519.648.310.002	6,065,197,339,025
622	Aset Keuangan Luar Negeri	-	-
6222	Uang dan Deposito	-	-
6223	Surat Berharga Selain Saham	-	-
6224	Pinjaman	-	-
6225	Saham dan Ekuitas Lain	-	-
6228	Piutang Lainnya	-	-
63	Kewajiban	5.567.812.216.530	5,515,557,898,498
6303	Surat Berharga Utang	-	-
6304	Pinjaman	409.814.715.659	562,808,396,655
6308	Utang Lainnya	5.157.997.500.871	4,952,749,501,843
630	Kewajiban Domestik	5.567.812.216.530	5,515,557,898,498
6303	Surat berharga selain saham	-	-
6304	Pinjaman	409.814.715.659	562,808,396,655
6308	Utang Lainnya	5.157.997.500.871	4,952,749,501,843
632	Kewajiban Luar Negeri	-	-

LKPK & LSKP Tahun 2024 Triwulan III

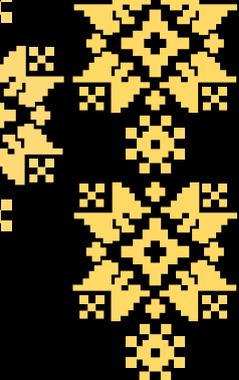
6323	Surat berharga selain saham	-	-
6324	Pinjaman	-	-
6328	Utang Lainnya	-	-

**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	30 SEP 2024	31 DES 2023
6	KEKAYAAN BERSIH	209.499.154.866.104	205.770.705.444.374
61	Aset Non Keuangan	204.454.447.329.306	203.337.863.430.668
611	Aset Tetap	68.475.415.148.345	67.051.690.397.858
6111	Gedung dan Bangunan	63.861.062.452.436	62.347.096.542.955
6112	Peralatan dan Mesin	3.393.982.800.809	3.500.219.514.921
6113	Aset Tetap Lainnya	1.220.369.895.100	1.204.374.339.982
612	Persediaan	2.504.077.766.970	2.563.606.284.261
614	Aset Nonproduksi	133.474.954.413.991	133.722.566.748.549
6141	Tanah	133.444.542.503.078	133.692.251.837.636
6144	Aset Tak Berwujud	30.411.910.913	30.314.910.913
62	Aset Keuangan	7.625.316.085.446	4.808.202.563.326
6202	Uang dan Deposito	3.456.150.423.452	2.111.887.198.971
6203	Surat Berharga Selain Saham	327.650.000.000	305.900.000.000
6204	Pinjaman	-	-
6205	Saham dan Ekuitas Lain	-	-
6208	Piutang Lainnya	3.841.515.661.994	2.390.415.364.355
621	Aset Keuangan Domestik	7.625.316.085.446	4.808.202.563.326
6212	Uang dan Deposito	3.456.150.423.452	2.111.887.198.971
6213	Surat Berharga Selain Saham	327.650.000.000	305.900.000.000
6214	Pinjaman	-	-
6215	Saham dan Ekuitas Lain	-	-
6218	Piutang Lainnya	3.841.515.661.994	2.390.415.364.355
63	Kewajiban	2.580.608.548.648	2.375.360.549.620
6303	Surat Berharga Utang	-	-
6304	Pinjaman	-	-
6308	Utang Lainnya	2.580.608.548.648	2.375.360.549.620
630	Kewajiban Domestik	2.580.608.548.648	2.375.360.549.620
6303	Surat berharga selain saham	-	-
6304	Pinjaman	-	-
6308	Utang Lainnya	2.580.608.548.648	2.375.360.549.620
632	Kewajiban Luar Negeri	-	-
6323	Surat berharga selain saham	-	-
6324	Pinjaman	-	-
6328	Utang Lainnya	-	-

**NERACA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KONSOLIDASIAN
TINGKAT WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PER 30 SEPTEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023
(Dalam Rupiah)**

KODE	AKUN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH	30 SEP 2024	31 DES 2023
6	KEKAYAAN BERSIH	121.621.886.769.596	118.269.992.234.491
61	Aset Non Keuangan	100.877.247.455.745	103.373.493.456.316
611	Aset Tetap	74.969.001.716.580	77.488.659.784.066
6111	Gedung dan Bangunan	61.327.097.702.400	63.189.584.077.365
6112	Peralatan dan Mesin	3.662.997.185.696	4.487.386.218.912
6113	Aset Tetap Lainnya	9.978.906.828.484	9.811.689.487.789
612	Persediaan	701.699.830.820	701.699.830.820
614	Aset Nonproduksi	25.206.545.908.345	25.183.133.841.430
6141	Tanah	25.206.545.908.345	25.183.133.841.430
6144	Aset Tak Berwujud	-	-
62	Aset Keuangan	24.891.133.401.850	19.195.986.547.171
6202	Uang dan Deposito	8.864.661.443.339	3.194.200.167.323
6203	Surat Berharga Selain Saham	388.603.437	388.603.437
6204	Pinjaman	-	-
6205	Saham dan Ekuitas Lain	11.188.660.286.948	11.167.325.381.623
6208	Piutang Lainnya	4.837.423.068.127	4.834.072.394.789
621	Aset Keuangan Domestik	24.891.133.401.850	19.195.986.547.171
6212	Uang dan Deposito	8.864.661.443.339	3.194.200.167.323
6213	Surat Berharga Selain Saham	388.603.437	388.603.437
6214	Pinjaman	-	-
6215	Saham dan Ekuitas Lain	11.188.660.286.948	11.167.325.381.623
6218	Piutang Lainnya	4.837.423.068.127	4.834.072.394.789
63	Kewajiban	4.146.494.088.000	4.299.487.768.996
6303	Surat Berharga Utang	-	-
6304	Pinjaman	409.814.715.659	562.808.396.655
6308	Utang Lainnya	5.157.997.500.870	3.736.679.372.341
630	Kewajiban Domestik	4.146.494.088.000	4.299.487.768.996
6303	Surat berharga selain saham	-	-
6304	Pinjaman	409.814.715.659	562.808.396.655
6308	Utang Lainnya	5.157.997.500.870	3.736.679.372.341
632	Kewajiban Luar Negeri	-	-
6323	Surat berharga selain saham	-	-
6324	Pinjaman	-	-
6328	Utang Lainnya	-	-



METADATA



META DATA

INFORMASI DASAR	
1. Nama Data	: LKPK & LSKP Tingkat Wilayah Triwulan III Tahun 2024
2. Penyelenggara	: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Direktorat Statistik Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3. Alamat	: Gedung Keuangan Negara LT.2 JL. Kapten A. Rivai No. 2-4
4. Nomor Telepon	: 0711-351476
5. Nomor Faksimili	: 0711-310891
6. Email	: Kanwildjpbnsumsel@kemenkeu.go.id
DEFINISI DATA	
<p>Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah merupakan laporan keuangan penggabungan antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tingkat Wilayah dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah. Entitas pelaporan yang dicakup dalam laporan keuangan konsolidasian ini adalah Satuan Kerja (UAKPA) Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah Lingkup Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan.</p> <p>Sedangkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah adalah laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan pemerintah di wilayah kerja Kanwil DJPb selama satu periode berdasarkan klasifikasi statistik keuangan pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan.</p> <p>Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Periode Triwulan III yang disusun meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LKPP-TW) disusun berdasarkan hasil konsolidasian dari seluruh UAKPA lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan dengan UAKKBUN Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi LRA, LO dan Neraca;2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPDK-TW) disusun berdasarkan hasil konsolidasian LKPD seluruh pemerintah daerah lingkup Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi LRA, LO Estimasi dan Neraca Estimasi;3. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) disusun berdasarkan hasil konsolidasian LKPP-TW dan LKPDK-TW yang meliputi LRA, LO Estimasi dan Neraca Estimasi.	

4. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah yang disusun meliputi LSKP-LO dan LSKP-Neraca. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW) merupakan hasil mapping akun GFS berdasarkan LKPP-TW dan LKPKD-TW

CAKUPAN DATA

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Konsolidasian, Laporan Operasional Estimasi dan Neraca Estimasi Pemerintah Daerah Konsolidasian
2. Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca Pemerintah Pusat dan LPE Pemerintah Pusat yang didapat dari SIKRI Modul Pelaporan
3. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian merupakan hasil konsolidasian antara LKPP-TW dengan LKPKD-TW
4. Laporan Statistik Keuangan Pemerintah berdasarkan mapping ke akun GFS dari laporan LKPP-TW dan LKPKD-TW

PERIODESASI PUBLIKASI

Triwulan III Tahun 2024

KETEPATAN WAKTU PUBLIKASI

Laporan GFS Triwulan III Tahun 2024 selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2024

JADWAL PUBLIKASI KE DEPAN/ADVANCE RELEASE CALENDAR (ARC)

Satu bulan sebelum publikasi berikutnya diterbitkan

SUMBER DATA

Data keuangan pemerintah daerah berupa data realisasi anggaran 18 Kab/Kota lingkup Kanwil DJPb Sumsel yang diperoleh langsung dari Pemkab/Kota lingkup Sumsel.. Data keuangan pemerintah daerah tersebut kemudian diolah dengan menggunakan kertas kerja *excel* LRA LKPKD. Data laporan operasional, data neraca pemerintah daerah konsolidasian merupakan data estimasi yang didapat dari data data realisasi anggaran pemda yang kemudian diolah dengan menggunakan kertas kerja *excel* estimasi neraca dan LO LKPKD. Selanjutnya dilakukan pengunggahan data LKPKD ke aplikasi SIKRI Modul Pelaporan. Data LKPP tersedia langsung pada aplikasi SIKRI Modul Pelaporan.

Atas data LKPKD dan LKPP tersebut dilakukan proses konsolidasian dan eliminasi akun-akun resiprokal dengan menggunakan aplikasi SIKRI Modul Pelaporan

METODOLOGI

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah disusun berdasarkan kerangka konsolidasi akuntansi sebagaimana diatur dalam PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian Lampiran II PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kerangka Statistik Keuangan Pemerintah melalui estimasi, analisis, penyesuaian, dan reklasifikasi akun laporan keuangan konsolidasian (*high level mapping*) dengan BAS Statistik Keuangan Pemerintah.

Laporan keuangan konsolidasian yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian, Neraca Konsolidasian dan Laporan Arus Kas Konsolidasian, yang proses konsolidasinya dilakukan dengan tiga tahap, yaitu (1) Konsolidasi Laporan Keuangan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) Kementerian Negara/Lembaga dan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (2) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dan (3) Konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tingkat Wilayah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sesuai dengan PSAP Nomor 11, konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya dengan atau tanpa mengeliminasi akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Pada laporan keuangan konsolidasian ini, kebijakan eliminasi akun timbal balik meliputi (1) Eliminasi akun timbal balik yang jumlahnya sama, (2) Eliminasi akun timbal balik yang tidak sama jumlahnya, (3) Eliminasi akun timbal balik yang tidak habis terkonsolidasi pada konsolidasi tingkat sebelumnya.

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah, yang disusun berdasarkan pendekatan *high level mapping*, terdiri dari Laporan Operasional yang di-*mapping* menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Konsolidasian dan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah.

INTEGRITAS DATA

1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan data *given* yang tersedia pada aplikasi SIKRI modul Pelaporan yang telah terekonsiliasi dari seluruh satuan kerja (UAKPA) yang berada pada lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan.
2. Data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 18 Kab/kota diperoleh langsung dari pemerintah kab/kota bersangkutan. Data Keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sedangkan untuk data Laporan Operasional (LO) dan Neraca merupakan data estimasi yang didapat dari proses *mapping* data realisasi anggaran dengan menggunakan kerta kerja *excel*

estimasi neraca LO. Atas data Pemerintah Daerah tersebut dilakukan proses konsolidasi dan diunggah ke aplikasi SIKRI Modul Pelaporan.

3. Proses konsolidasi LKPK dan LKPP dilakukan secara sistem melalui aplikasi SIKRI Modul Pelaporan dengan melakukan jurnal penyesuaian dan jurnal eliminasi akun-aku resiprokal.
4. Revisi data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

AKSES DATA

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Gedung Keuangan Negara LT.2 JL. Kapten A. Rivai No. 2-4



Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Provinsi Sumatera Selatan
Jl. Kapten A. Rival No. 2, Palembang - 30 129, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I
Kota Palembang, Sumatera Selatan
Telp. (0711) 356534